

jogja
istimewa



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY
Jalan Sagan III/4 Yogyakarta

jogja
istimewa



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS "NAMA OPD" TAHUN 2017-2022

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

RENCANA STRATEGIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanawata'ala yang telah memberikan kemudahan kepada Tim Penyusun Renstra Perubahan untuk menyelesaikan dengan tepat waktu Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 - 2022 ini.

Dalam penyusunan laporan ini kami tidak lepas dari mengacu pada PERMEN Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sehingga pada penyusunan tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan buku Renstra Perubahan ini masih terdapat sejumlah kekurangan. Masih banyak keterbatasan dalam menyikapi permasalahan serta isu strategis yang berkembang menjadikan penyusunan Renstra Perubahan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saran, kritik, dan masukan lain yang membangun sangat diharapkan.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat di dalam penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 - 2022 baik pikiran, tenaga, dan waktu. Semoga laporan ini bisa dipakai sebagai bahan kajian atau informasi yang lain serta sebagai acuan kegiatan tahun yang akan datang.

Yogyakarta, 4 Agustus 2022

Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan DIY



Ir. Bayu Mukti Sasongka, M.Si
NIP. 19641103 199102 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan	11
1.5. Sistematika Penulisan	12
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	28
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.4 Tantangan dan Peluang Penembangan Pelayanan Perangkat Daerah	40
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	43
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	43
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	46



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	
Strategis -----	49
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis -----	50
IV. TUJUAN DAN SASARAN -----	51
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN-----	52
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN -----	55
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN -----	122
VIII. PENUTUP -----	123



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY -----	28
Tabel 2. Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan-----	30
Tabel 3. Kondisi Sarana dan Prasarana BPTPB-----	31
Tabel 4. Kondisi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng -----	31
Tabel 5. Pencapaian Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan DIY -----	34
Tabel 6. Pencapaian Kinerja Pendukung Dinas Kelautan dan Perikanan DIY-----	35
Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY -----	38
Tabel 8. Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah-----	51
Tabel 9. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan-----	53
Tabel 10. Indikator Kinerja Program Dinas Kelautan dan Perikanan DIY -----	58
Tabel 11. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan DIY -----	60
Tabel 12. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Dana Keistimewaan -----	113
Tabel 13. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD-----	122



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proporsi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	28
Gambar 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	29
Gambar 3. Realisasi Produk Perikanan Tangkap dan Budidaya	37
Gambar 4. Grafik Pencapaian Kinerja Anggaran	40



Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan bagian dari sistem perencanaan nasional di tingkat daerah. Kegiatan ini penting karena perencanaan strategis merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis merupakan sebuah petunjuk atau pedoman organisasi yang dapat digunakan untuk merencanakan tujuan dari kondisi saat ini menuju kondisi 5 tahun mendatang lengkap dengan perencanaannya, langkah-langkahnya serta pengukurannya. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Lebih spesifik tentang perencanaan, yang dimaksud dengan Rencana strategis Instansi (Renstra OPD) adalah dokumen perencanaan instansi jangka menengah (5 tahun) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi, yang disusun sesuai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) dan bersifat indikatif.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) mengamanatkan, bahwa instansi wajib menyusun Rencana Strategis Instansi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan. Disamping itu sesuai dengan Inpres No 2 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum kedua, setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan paparan Visi dan Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 – 2022 pada saat penetapan Gubernur DIY tanggal 2 Agustus 2017 yang




lalu, visi DIY ke depan adalah **Menyongsong “Abad Samudera Hindia” untuk kemuliaan martabat manusia Jogja.**

Abad Samudera Hindia ialah momentum yang perlu dimanfaatkan segenap pemangku kepentingan DIY untuk memanfaatkan potensi kelautan di sisi selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan. Menyongsong Abad Samudera Hindia yang dimaksud dalam tema visi dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena Indian Ocean Rim Association (IORA), Kra-Canal/ Thai Canal Project serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan.

Pilihan tema kemaritiman sebagai payung kebijakan Pembangunan Lima Tahun ke depan, merupakan upaya menyambung sejarah yang telah diukir oleh nenek moyang, namun kemudian telah dilupakan sejak sekitar 1670-an melalui penghancuran sendiri armada-armada independen pedagang Jawa oleh Amangkurat.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki garis pantai sepanjang sekira 113 kilometer (Data Vertikal Pangkalan TNI AL dalam <http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku>). Pada garis pantai kawasan-kawasan di bagian selatan yang membentang dari Kulon Progo, Bantul sampai dengan Gunungkidul memiliki potensi kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. Ketiga kabupaten tersebut tentu juga akan memiliki posisi strategis dalam lalulintas perekonomian di wilayah Samudera Hindia. Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, Abad 21 merupakan Abad Samudra Hindia yang diyakini merupakan masa depan maritim yang strategis bagi Indonesia setelah era Samudra Atlantik (abad 19) dan Samudra Pasifik (abad 20) berlalu. Diyakini, separuh dari kapal kontainer dunia, sepertiga lalulintas kargo, dan dua pertiga pengiriman minyak dunia melalui jalur Samudera Hindia yang menjadi tempat tinggal sekira 2,6 miliar jiwa dari berbagai bangsa yang membentang dari Asia Tenggara sampai dengan Afrika Selatan.

Dalam rangka meningkatkan potensi dan kerjasama antara negara-negara Samudra Hindia tersebut telah terbentuk IORA (Indian Ocean Rim Association atau Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia, 1997) yang digagas Nelson Mandela pada tahun 1995. Negara-negara anggota IORA mencakup negara-negara ASEAN, Australia, Asia Selatan, Asia Barat, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Asosiasi ini telah membuat kesepakatan-kesepakatan kerjasama di bidang perikanan, energi




kelautan, pelabuhan dan pelayaran, mineral dasar laut, bioteknologi kelautan, pariwisata, perdagangan, investasi, dan ekonomi.

Terkait dengan potensi strategis maritim tersebut, terdapat tantangan ke depan dengan dibangunnya Kra-Canal Project (Terusan Kra di Thailand). Terusan yang mirip dengan Suez dan Panama ini akan membuat sudetan pada leher semenanjung Thailand-Malaysia untuk menghubungkan perairan Laut Andaman dan perairan Teluk Thailand sehingga akan memperpendek jarak pelayaran dari belahan bumi bagian barat ke negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan China.

Dampak dari Kra-Canal terhadap peta intensitas lalu lintas pelayaran di perairan Asia Timur dan Asia Tenggara tentu akan sangat berarti dan khusus untuk perairan Indonesia akan berdampak pada meningkatnya intensitas pelayaran di ALKI-II (Alur Laut Kepulauan Indonesia-II yang mencakup Laut Sulawesi, Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok). Meningkatnya intensitas pelayaran di ALKI-II dapat berdampak pada meningkatnya intensitas lalu lintas pelayaran silang antara Asia-Australia dan Samudera Hindia-Samudera Pasifik. Fenomena Kra-Canal perlu diantisipasi ke depan sebagai peluang Pulau Jawa Bagian Selatan menjadi sangat penting terutama dalam hal penyediaan jasa pelabuhan, energi, perikanan, dan pariwisata, maupun tantangan apabila terjadi perubahan lalu lintas pelayaran

Kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang Misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia". Misi tersebut adalah: 1) terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing; 2) terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan; 3) terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan; 4) terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan 5) terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan



nepotisme.

Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY dapat diejawantahkan dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban


Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1,2 dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemerintah Daerah DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup-kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan
- c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Gini Index), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (index williamson).
- d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

2) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;


Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya pewujudan misi kedua sekurangnya dengan :

- a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).
- b. Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil



negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Etos, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan perubahan persepsi (mind set) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantor, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang menyandang arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan adanya pergeseran mind set, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Scandinavia dan Jepang, adalah contoh negara yang memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi

Sebagai lembaga teknis dibidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dapat mengambil peran dalam pelaksanaan misi yang pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban. Dengan penekanan visi pada "Abad Samudera




Hindia” hal ini berarti terdapat penekanan pembangunan DIY ke depan secara keseluruhan akan difokuskan pada wilayah kelautan dan sekitarnya. Posisi ini mempunyai konsekuensi pada pembangunan dengan basis kelautan dalam segala aspek, termasuk aspek perikanan dan kegiatan perekonomian masyarakat pesisir. Visi dan Misi tersebut tentunya merupakan tantangan sekaligus peluang yang besar bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang ada di DIY. Kesempatan ini dapat menjadi pertimbangan penyusunan perencanaan strategis 5 tahun ke depan bagi lembaga teknis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemda DIY tahun 2017-2022. Penyusunan dokumen Renstra ini, disamping berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, juga berdasarkan pada analisis lingkungan, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditentukan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. Isu-isu strategis dipetakan dan dianalisis SWOT untuk menentukan alternatif-alternatif strategi ke depan. Kemudian dokumen Renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja beserta pendanaanya tiap tahun sehingga akuntabilitas pelaksanaan beserta pengorganisasinya dapat dievaluasi selama periode 2017-2022.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keadaan saat ini maka perlu disusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta

Meskipun dokumen Perubahan Renstra ini telah disusun sedemikian rupa, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam perjalannya ke depan terjadi penyempurnaan atau perubahan. Hal ini disebabkan renstra merupakan *living document* yang sifatnya dinamis. Jika terjadi situasi baik internal maupun eksternal yang mengharuskan ada penyempurnaan, maka hal tersebut sangat mungkin dilakukan demi perencanaan yang lebih strategis dan pelaksanaan yang lebih baik.

Perubahan Renstra ini mempunyai fungsi penting sebagai pedoman pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun), yaitu Rencana Kerja Instansi, Rencana Kerja Anggaran serta untuk pedoman pelaksanaan Laporan



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY selama 5 (lima) tahun ke depan.


Perubahan renstra ini dilakukan akibat dari adanya pandemi covid 19 yang melanda indonesia dan dunia. Hampir semua sektor terdampak adanya pandemi ini karena sektor kelautan dan perikanan juga merupakan salah satu pendukung dari sektor wisata yang banyak menyedot produksi perikanan. Selain itu sektor transportasi yang lumpuh menyebabkan ekspor dan impor produk kelautan dan perikanan menjadi terhambat. Untuk itu perlu dilakukan redsain terhadap target program dan kegiatan agar dapat tercapai diakhir tahun.

Dokumen Perubahan Renstra ini merupakan acuan arah kebijakan dan tujuan instansi bagi satuan kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan selama tahun 2017-2022 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan efektif. Dokumen ini juga sebagai pengikat instansi agar tidak berjalan sendiri-sendiri antar bagian, karena instansi ini mempunyai tujuan dan sasaran yang bersumber dari visi dan misi yang sama. Sehingga semuanya terikat dalam wadah yang satu dan saling sinergi. Dengan tersedianya Perubahan Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di DIY akan berjalan lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan.

1.2 Landasan Hukum


1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

- 
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan 3 September 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta



Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nornor 3 Tahun 2009;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030;
18. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2011 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2018



tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;

23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
24. Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 65/KEP/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di DIY.
25. Surat Edaran Nomor 050/ 7022 tentang Redisain Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
26. Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir RKPD-P DIY Tahun 2022


1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2017-2022 ini adalah:

1. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan kegiatan dalam rangka mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di DIY.
2. Mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan secara menyeluruh, terintegrasi dan sinergis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang lain, terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. **Ditetapkannya status tanggap darurat bencana corona virus disease 2019 (Covid-19) di DIY berdasarkan keputusan gubernur nomor 65/KEP/2020.**

Sedangkan **dan** tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2017-2022 ini adalah :

1. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar daerah, antar pusat dan daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan.
2. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan



pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang kelautan dan perikanan di DIY;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik karena adanya pengukuran kinerja yang jelas.
5. Merespon adanya dampak covid-19 di sektor kelautan dan perikanan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat mempercepat penanganan covid-19.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keadaan saat ini maka perlu disusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan renstra merupakan living document yang sifatnya dinamis. Jika terjadi situasi baik internal maupun eksternal yang mengharuskan ada penyempurnaan, maka hal tersebut sangat mungkin dilakukan demi perencanaan yang lebih strategis dan pelaksanaan yang lebih baik. Perubahan yang kami lakukan pada tolok ukur kinerja yang disesuaikan dengan keadaan kemampuan yang ada.

Selain itu dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional maka perlu dilakukan perubahan pada target-target yang telah kami susun khususnya pada tahun 2020 hingga 2022 mendatang.



1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan, berikut adalah tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kelautan dan perikanan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- c. pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- d. pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- e. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- g. pengelolaan pelabuhan perikanan pantai;
- h. perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut;
- j. pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- k. penerbitan rekomendasi izin penangkapan ikan;
- l. penerbitan rekomendasi izin budidaya ikan antar Kab/Kota dalam DIY;
- m. penerbitan rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
- n. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, adat istiadat dan tradisi luhur bidang kelautan dan perikanan;
- o. perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;


- 
- p. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan;
 - q. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - r. pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan;
 - s. pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
 - t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Dinas. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program Dinas;
- d. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- e. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Dinas;
- f. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. pengelolaan keuangan Dinas;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- j. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- k. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
- l. pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- m. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat di bagi menjadi 3 Subbagian, yaitu Subbagian Umum, Subbagian



Keuangan, Subbagian Program dan Informasi. Masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut

a. Subbagian Umum;


Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepastakaan dan ketatalaksanaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan program kerja Subbagian Umum;
- 2) penyiapan bahan kebijakan teknis urusan umum;
- 3) pengelolaan kearsipan;
- 4) penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- 5) pengelolaan barang;
- 6) pengelolaan data kepegawaian;
- 7) penyiapan bahan mutasi pegawai;
- 8) penyiapan kesejahteraan pegawai;
- 9) penyiapan bahan pembinaan pegawai;
- 10) penyelenggaraan kehumasan;
- 11) pengelolaan kepastakaan;
- 12) penyiapan bahan ketatalaksanaan;
- 13) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
- 14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
- 2) penyiapan bahan kebijakan teknis urusan keuangan;
- 3) pengelolaan keuangan Dinas;
- 4) pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- 5) pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
- 6) penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;

- 
- 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan; dan
 - 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Program


Subbagian Program dan Informasi mempunyai tugas penyusunan program Dinas, pengelolaan data, pengembangan sistem dan teknologi informasi, evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Informasi mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan program kerja Subbagian Program;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
- 3) penyusunan rencana program Dinas;
- 4) penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama di bidang kelautan dan perikanan;
- 5) pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi bidang kelautan dan perikanan;
- 6) penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program bidang kelautan dan perikanan;
- 7) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Program; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perikanan budidaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Perikanan Budidaya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perikanan budidaya;
- c. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyiapan rekomendasi sertifikasi perikanan budidaya;

- 
- e. pelaksanaan produksi perikanan budidaya;
 - f. pengembangan teknologi perikanan budidaya;
 - g. pengembangan perbenihan perikanan budidaya;
 - h. pembinaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan program perikanan budidaya;
 - i. pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perikanan Budidaya; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang perikanan budidaya dibagi menjadi 2 seksi yaitu Seksi Teknis Perikanan Budidaya dan Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Seksi Teknis Perikanan Budidaya

Seksi Teknis Perikanan Budidaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis perikanan budidaya. Seksi Teknis Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja Seksi Teknis Perikanan Budidaya;
- 2) penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan budidaya ikan;
- 3) pengelolaan data teknis perikanan budidaya;
- 4) pembinaan mutu benih/induk ikan;
- 5) pembinaan penggunaan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis, pakan ikan;
- 6) pembinaan pemanfaatan lahan dan penyelenggaraan perikanan budidaya serta perlindungannya;
- 7) pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan hama, wabah dan penyakit ikan;
- 8) monitoring residu antibiotik, cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
- 9) pelaksanaan bimbingan teknis dan rekomendasi penerbitan sertifikat perikanan budidaya;
- 10) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 11) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program



Seksi Teknis Perikanan Budidaya; dan

12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya


Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan mempunyai tugas tugas melaksanakan urusan pengembangan usaha perikanan budidaya. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja;
- 2) penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
- 3) pengelolaan data usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
- 4) penyiapan bahan pertimbangan teknis dan rekomendasi perijinan usaha perikanan budidaya;
- 5) fasilitasi kemitraan, investasi dan permodalan usaha perikanan budidaya;
- 6) pelaksanaan pembinaan fasilitasi usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
- 7) penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
- 8) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- 9) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 10) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya; dan
- 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas di bidang perikanan tangkap. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perikanan tangkap;


- 
- c. pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyiapan rekomendasi sertifikasi perikanan tangkap;
 - e. pelaksanaan program produksi perikanan tangkap;
 - f. pembinaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan program perikanan tangkap;
 - g. pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perikanan Tangkap; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang perikanan Tangkap dibagi menjadi 2 seksi yaitu Seksi Teknis Perikanan Tangkap dan Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap. Masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Seksi Teknis Perikanan Tangkap

Seksi Teknis Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis perikanan tangkap. Untuk melaksanakan tugas Seksi Teknis Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja;
- 2) penyiapan bahan kebijakan teknis perikanan tangkap;
- 3) pengelolaan data teknis perikanan tangkap;
- 4) pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap;
- 5) fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap;
- 6) penyiapan bahan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan, standarisasi kelaikan kapal perikanan dan pengawakan kapal;
- 7) pembinaan dan pengendalian penerapan tatalaksana perikanan tangkap;
- 8) pengembangan teknologi perikanan tangkap;
- 9) pelaksanaan bimbingan teknis dan rekomendasi penerbitan sertifikasi perikanan tangkap;
- 10) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 11) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Teknis Perikanan Tangkap; dan



12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap


Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis perikanan tangkap. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja;
- 2) penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan usaha perikanan tangkap;
- 3) pengelolaan data kelembagaan usaha perikanan tangkap;
- 4) pembinaan dan fasilitasi usaha perikanan tangkap;
- 5) penyiapan bahan pertimbangan teknis, rekomendasi perijinan dan dokumen usaha perikanan tangkap;
- 6) fasilitasi kemitraan, investasi dan permodalan usaha perikanan tangkap;
- 7) pengembangan kelembagaan perikanan tangkap;
- 8) penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan dan kelembagaan usaha perikanan tangkap;
- 9) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 10) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
- 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pembinaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;


- 
- e. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan memberikan rekomendasi izin usaha dan sertifikasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - g. Pelaksanaan program optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - h. pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dibagi menjadi 2 seksi yaitu Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Seksi Pemasaran Hasil Perikanan. Masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan

Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengolahan hasil perikanan. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja;
- 2) penyiapan bahan kebijakan teknis pengolahan hasil perikanan, pengelolaan laboratorium dan pengujian mutu hasil perikanan;
- 3) pengelolaan data usaha pengolahan hasil perikanan;
- 4) pembinaan unit-unit pengolahan;
- 5) pengembangan kelembagaan pengolahan hasil perikanan;
- 6) pelaksanaan pengelolaan laboratorium, pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan;
- 7) pembinaan dan fasilitasi usaha pengolahan hasil perikanan;
- 8) penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan dan pengujian mutu hasil perikanan;
- 9) penyiapan bahan pertimbangan teknis dan rekomendasi perijinan pengolahan hasil perikanan;
- 10) fasilitasi kemitraan, investasi dan permodalan usaha pengolahan hasil perikanan;
- 11) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- 
- 12) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - 13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan


Seksi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengolahan hasil perikanan. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja;
- 2) penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan pemasaran hasil perikanan;
- 3) pengelolaan data usaha pemasaran hasil perikanan;
- 4) pembinaan unit-unit pemasaran;
- 5) pengembangan kelembagaan pemasaran hasil perikanan;
- 6) fasilitasi pemasaran dan penyelenggaraan promosi kelautan dan perikanan;
- 7) penyiapan bahan pertimbangan teknis dan rekomendasi perijinan pemasaran hasil perikanan;
- 8) fasilitasi kemitraan, investasi dan permodalan usaha pemasaran hasil perikanan;
- 9) penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan usaha pemasaran hasil perikanan;
- 10) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 11) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan kelautan, pesisir, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;


- 
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kelautan, pesisir, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan kelautan, pesisir dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - e. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - f. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian tata ruang laut;
 - g. penerbitan rekomendasi perijinan pemanfaatan ruang laut;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut;
 - i. Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - j. pelaksanaan program rehabilitasi ekosistem dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - k. pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan dibagi menjadi 2 seksi yaitu Seksi Pendayagunaan Laut dan pesisir dengan Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir :

Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan pendayagunaan laut dan pesisir. Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan program kerja Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir;
- 2) penyiapan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan pendayagunaan laut dan pesisir;
- 3) pengelolaan data pendayagunaan laut dan pesisir;
- 4) pengembangan jasa kelautan;
- 5) penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya perairan, pulau-pulau kecil dan laut;

- 
- 6) pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - 7) pelaksanaan mitigasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 8) pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
 - 9) pertimbangan teknis dan rekomendasi ijin pemanfaatan ruang laut;
 - 10) penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut;
 - 11) pembinaan dan pengendalian tata ruang laut;
 - 12) pembinaan kebaharian;
 - 13) pembinaan pengelolaan sumber daya kelautan;
 - 14) pengembangan teknologi kelautan;
 - 15) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - 16) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir; dan
 - 17) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengawasan sumberdaya Kelautan dan perikanan. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- 2) penyiapan bahan kebijakan teknis pengawasan sumberdaya Kelautan dan perikanan;
- 3) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
- 4) pembinaan dan fasilitasi pengawasan eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 5) pemantauan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya pulau-pulau kecil;
- 6) pemantauan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 7) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi



Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan

- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. UPT;

a. UPT Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya

Susunan organisasi Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya terdiri dari:

- 1) Kepala Balai;
- 2) Subbagian Tata Usaha;
- 3) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Tawar;
- 4) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Payau dan Air Laut; dan
- 5) Jabatan Fungsional.

Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan program kerja;
- 2) pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya air tawar, air payau dan air laut;
- 3) pelaksanaan perbenihan perikanan air tawar, air payau dan air laut;
- 4) pelaksanaan pengelolaan induk ikan;
- 5) pelaksanaan diseminasi induk dan benih unggul;
- 6) pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan;
- 7) pelaksanaan ketatausahaan;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng

Susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng terdiri dari:

- 1) Kepala Pelabuhan;
- 2) Subbagian Tata Usaha;
- 3) Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
- 4) Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan



5) Jabatan Fungsional.

Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan program kerja;
- 2) pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi pelabuhan perikanan;
- 3) pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan;
- 4) pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- 5) pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
- 6) pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- 7) fasilitasi penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- 8) pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- 9) pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai;
- 10) fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- 11) pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- 12) pelaksanaan pengawasan penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik;
- 13) pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- 14) pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan;
- 15) pelaksanaan ketatausahaan;
- 16) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
- 17) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



8. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing. Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum.
3. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
 - a. Seksi Teknis Perikanan Budidaya; dan
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya.
4. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - a. Seksi Teknis Perikanan Tangkap; dan
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap.
5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - b. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan.
6. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir; dan
 - b. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
7. UPT; dan
8. Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY pada tahun 2018 berjumlah 123 orang, dengan rincian pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan sejumlah 61 orang, pegawai UPTD Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (BPTPB) sejumlah 43 orang dan pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng sejumlah 19 orang. Rincian jumlah pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

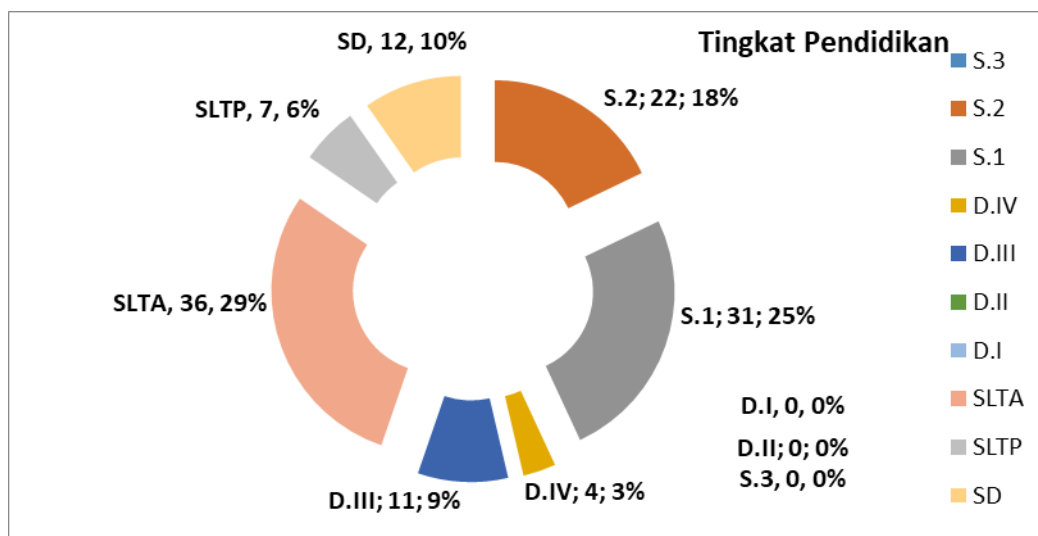
Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

INSTANSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Dinas Kelautan dan Perikanan	34	27	61
BPTPB	39	4	43
PPP Sadeng	19	0	19
Jumlah	94	29	123

Sumber: Dislautkan DIY, 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 74,80%. Jumlah pegawai pada dinas induk mencapai 49,59 % sedangkan jumlah pegawai pada UPTD BPTKP Cangkringan mencapai 34,96% dan PPP Sadeng sebesar 15,45%.

Proporsi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

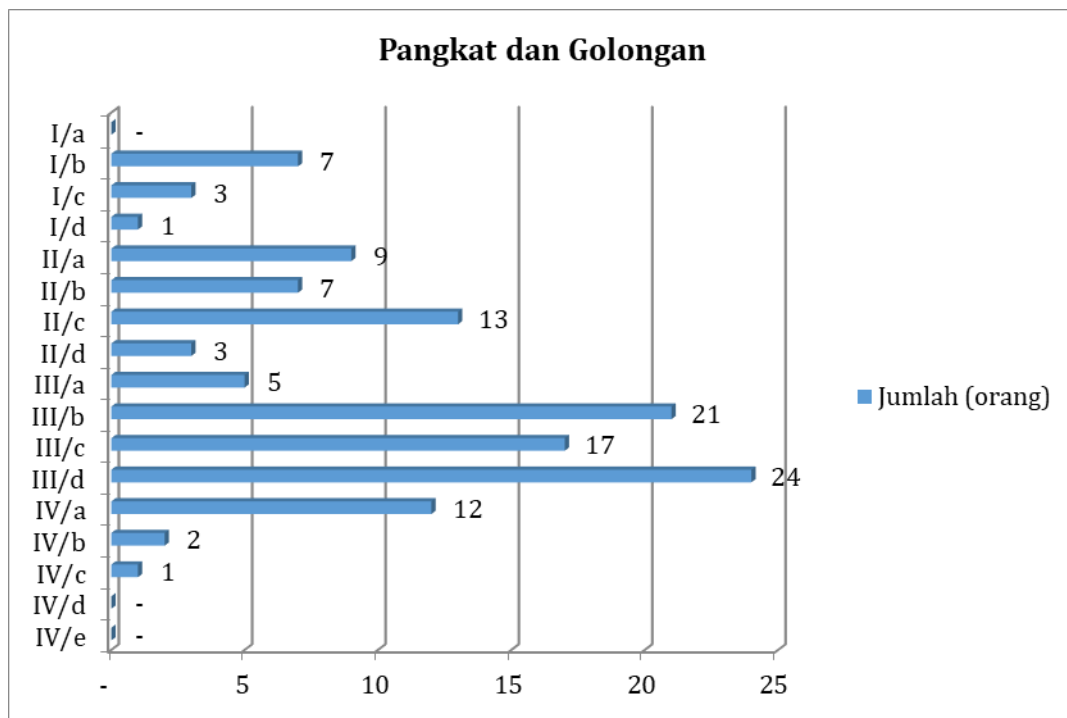


Gambar 1. Proporsi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebagian besar berpendidikan SLTA/ sederajat dengan jumlah sebanyak 36 orang atau 29%. Disusul dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 31 orang atau 26%. Tingkat pendidikan paling tinggi adalah S2 atau sejumlah 22 orang. Sedangkan tingkat pendidikan paling rendah adalah SD atau

pendidikan dasar sejumlah 12 orang.

Keadaan pegawai berdasarkan pangkat dan golongan didominasi oleh golongan III/d dengan pangkat Penata Tingkat 1 sebanyak 24 orang. Kemudian disusul dengan golongan III/b dengan pangkat Penata Muda sebanyak 21 orang. Golongan tertinggi di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY adalah golongan IV/c atau Pembina sebanyak 1 orang dan golongan terendah adalah golongan I/b atau Juru Muda Tingkat I sejumlah 7 orang. Secara rinci keadaan pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan disajikan sebagai berikut:



Gambar 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Sedangkan jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No 77 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY No 122 Tahun 2015 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY jumlah kebutuhan pegawai 112 orang baru terisi 61 orang atau baru terisi 54,46%.
- 2) Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (BPTPB) jumlah kebutuhan pegawai 107 orang terisi 43 orang atau baru terisi 43,00%.
- 3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng kebutuhan pegawai 58 orang terisi 19 orang atau baru terisi 32,76%.

Sarana dan prasarana aparatur di Dinas kelautan dan Perikanan DIY telah cukup untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Selengkapnya mengenai kondisi riil sarana dan prasarana aparatur dibandingkan dengan kondisi idealnya diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Nama Barang	Kondisi Riil	Kondisi Ideal
1	Kursi Eselon II	1	1
2	Kursi Eselon III	4	4
3	Kursi Eselon IV	12	12
4	Kursi Staf	45	100
5	Meja Eselon II	1	1
6	Meja Eselon III	4	4
7	Meja Eselon IV	12	12
8	Meja Staf	40	100
9	AC	31	50
10	Komputer	36	37
11	Laptop	62	63
12	Filling Cabinet	37	38
13	Almari Arsip	25	40
14	Kendaraan Roda Empat	15	15
15	Sepeda Motor	21	21
16	LCD/Proyektor	8	10
17	Printer	53	53
18	Mesin Facimili	1	1

Sumber: Dislautkan DIY, 2018

Namun sarana dan prasarana aparatur ini belumlah berada pada kondisi ideal. Keadaan sarana dan prasarana ideal berdasarkan pada analisis kebutuhan terhadap jumlah pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Telah dilakukan upaya untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Dinas Kelautan dan perikanan DIY, antara lain melalui kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional.

Sedangkan kondisi sarana dan prasarana aparatur di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Kondisi Sarana dan Prasarana BPTPB

No	Nama Barang	Kondisi Riil	Kondisi Ideal
1	Kursi Eselon III	1	1
2	Kursi Eselon IV	4	4
3	Kursi staf	39	121
4	Meja Eselon III	1	1
5	Meja Eselon IV	4	4
6	Meja Staf	35	117
7	AC	18	20
8	Komputer	8	16
9	Laptop	17	20
10	Filling Cabinet	1	9
11	Almari Arsip	23	38
12	Kendaraan Roda Empat	5	9
13	Kendaraan Roda Tiga	4	4
14	Kendaraan Roda Dua	11	11
15	LCD/Proyektor	3	5
16	Printer	11	20
17	Mesin Facimili	0	1
18	Mesin tik Manual	14	14

Sumber: *Dislautkan DIY, 2018*

Sarana dan Prasarana BPTPB tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya karena tidak ada pengadaan sarana dan prasarana baru. Peningkatan sarana dan prasarana dilakukan melalui program Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran.

Sarana dan Prasarana di PPP Sadeng juga tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya karena tidak ada pengadaan sarana dan prasarana baru. Berikut ini kondisi sarana dan prasarana aparatur di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng:

Tabel 4. Kondisi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng

No.	Nama Barang	Kondisi Riil	Kondisi Ideal
1	Kendaraan Roda 4	1	3
2	Kendaraan Roda 2	3	10
3	Genset	0	2
6	Kursi Eselon Iv	6	6
7	Meja Eselon Iv	6	6
8	Meja Eselon Iii	2	3
9	Kursi Eselon Iii	3	3

No.	Nama Barang	Kondisi Riil	Kondisi Ideal
10	PC Unit	15	20
11	Lap Top	12	15
12	Mesin Ketik	1	1
13	Kipas Angin	0	0
14	Filling Kabinet	19	19
15	Lemari Arsip	5	6
16	Rak Buku	0	3
17	Printer	16	20
18	Lcd	4	4
19	Mesin Pompa	11	11
20	Lemari Kaca	1	1
21	Lemari Kayu	3	3
22	Kursi Metal	26	26
23	Meja 1/2 Biro	1	1
24	Tempat Tidur Kayu	28	28
25	Meja Rapat	56	56
26	Kursi Rapat	136	136
27	Lemari Pakaian	24	24
28	Ac Unit	4	4
29	Antena SHF	1	1
30	Scanner	2	5
31	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4	4
32	Papan Pengumuman	2	2
33	Meja Makan	4	4
34	Televisi	9	9
35	Viewer	1	1
36	Camera Film	1	1
37	Meja Tulis	2	2
38	Kursi Tamu	4	4
39	Gordyn	70	70
40	Lemari Es	3	3
41	AC Split	17	17
42	Camera Digital	2	2
43	Megaphone	1	1
44	Peti Uang	1	1
45	Meja Kayu	15	15
46	Kursi Kayu	10	10
47	Meja Respsion	1	1
48	Meja Komputer	5	6
49	Sofa	15	15

No.	Nama Barang	Kondisi Riil	Kondisi Ideal
50	Partisi Kantor	15	15
51	Partisi Ruangan Kantor	2	2
52	Jam Mekanis	8	8
53	Amplifier	1	1
54	Loudspeaker	2	2
55	Sound System	1	1
56	Microphone	3	3
57	Dispencer	6	6
58	Alat Pemadam/ Portable	2	4
59	Speaker Aktif Komputer	5	5
60	Ups	6	6
61	Layar Film	4	4
62	Pesawat Telephone	8	8
63	Facsimile	1	1
64	Dongkrak Kapal	3	3
65	Kasur	24	24
66	Bantal	70	70
67	Sprei	45	45
68	Mesin Potong Rumput	8	8
69	Kompor Gas	4	8
70	Alat Penanak Nasi	4	7
71	Tabung Gas	6	8
72	Tangga Alumunium	4	4
73	Server	1	1
74	D-Link	1	4
75	CCTV	1	1
76	Tiang AWS Monopole + Aksesoris	1	1
77	Lampu Sinyal Menara	1	1
78	Proteksi Petir	1	1
79	Power Distribution Board	1	1
80	Solar Panel	1	1
81	Barometer	1	1
82	Wind Sensor Set	1	1
83	Alat Ukur Kelembaban Dan Suhu Udara	1	1
84	Alat Ukur Curah Hujan	1	1
85	Pyranometer	1	1
86	Stasiun Cuaca Otomatis	1	1
87	Guling	25	25
88	Selimut Wool	25	25
89	Rak Piring	1	1

No.	Nama Barang	Kondisi Riil	Kondisi Ideal
90	Alat Penarik Kapal	3	3

Sumber: Dislautkan DIY, 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk melakukan evaluasi hasil pelaksanaan renstra, maka indikator kinerja yang dipakai adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dievaluasi secara tahunan. Indikator Kinerja Utama tahunan yang dievaluasi adalah:

1. Meningkatnya nilai produksi perikanan
2. Terkelolanya kawasan konservasi perairan

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

No	Sasaran	Target NS PK	Target IKU	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan		Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) (juta rupiah)	318.947	322.136	325.357	328.611	331.897	320.348	301.500	324.211	345.870	-	100,43	93,59	99,65	105,25	-
2	Terkelolanya kawasan konservasi perairan		Peningkatan status kawasan konservasi (%)	20	30	60	80	100	20	30	30	80	-	100	100	50	100	-
Rata-Rata pencapai kinerja per tahun													100,21	96,79	74,83	102,63	-	

Berdasarkan tabel di atas, secara umum pencapaian berdasarkan target indikator kinerja utama telah tercapai. Rasio capaian pada tahun 2019 untuk target indikator kinerja utama Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) sebesar 93,59 % namun rasio capaian pada tahun 2020 untuk target indikator kinerja utama Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) naik menjadi sebesar 99,65 %. Rasio capaian pada tahun Pada target indikator kinerja utama peningkatan status kawasan konservasi, rasio capaian pada tahun 2019 sebesar 100 % namun pada tahun 2020 sebesar 50 %. Hal ini disebabkan karena anggaran yang digunakan untuk mendukung terkelolanya kawasan konservasi perairan difocussing untuk membantu pandemi covid-19 yang terjadi.

Selain indikator kinerja utama, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga memiliki kinerja pendukung yang dievaluasi antara lain:

1. Program Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan
5. Program Pengelolaan Pelabuhan
6. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
7. Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
8. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
9. Program Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya
10. Program Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Secara garis besar, perbandingan antara target dan realisasi yang ada pada indikator program pendukung dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 6. Pencapaian Kinerja Pendukung Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

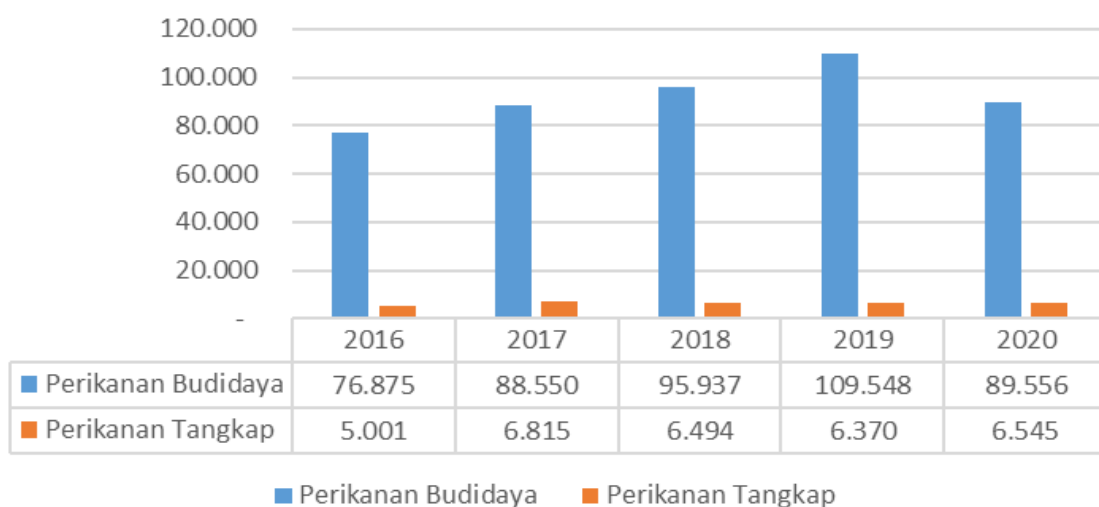
No	Program	Target NS PK	Target Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN		Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
4	PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN		nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan (milyar rupiah)	32,84	33,31	34,78	35,25	36,73	56,79	54,61	58,22	-	-	172,92	164,48	167,39	-	-
5	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP		produksi perikanan tangkap (ton)	5.817	6.199	6.481	6.863	7.063	6.494	6.370	6.545	-	-	111,63	102,75	100,98	-	-
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI		1. tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/ kap/ thn)	N/A	24,55	25,21	25,48	26,05	N/A	30,18	31,24	-	-	N/A	122,93	122,60	-	-



No	Program	Target NS PK	Target Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	PERIKANAN		2. produksi produk perikanan olahan (kg)	8.201	N/A	N/A	N/A	N/A	8.386	N/A	N/A	-	-	102,25	N/A	N/A	-	-
7	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA		produksi perikanan budidaya (ton)	89.336	89.400	89.500	89.600	89.700	95.937	109.548	89.556	-	-	107,38	122,53	100,06	-	-
8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA		1. Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	N/A	84	86	88	90	N/A	87	88	-	-	N/A	101,16	102,32	-	-
			2. Produksi benih kan yang bersertifikat	31,3	N/A	N/A	N/A	N/A	31,4	N/A	N/A	-	-	100,31	N/A	N/A	-	-
9	PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		1. Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	14	14	14	14	14	33,14	18,29	43,43	-	-	236,71	130,64	310,21	-	-
			2. Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	100	100	100	-
Rata-Rata pencapai kinerja per tahun													123,12	114,44				

Berdasarkan Tabel di atas, secara umum pencapaian program telah tercapai secara keseluruhan dan melebihi target. Dilihat rasio capaiannya, Program Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk target kinerja persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan pada tahun 2019 sebesar 130,64 %. Selain itu, Program Pengelolaan Pelabuhan untuk target kinerja nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan/ tempat pelelangan ikan pada tahun 2019 sebesar 164,48 %.

Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap



Gambar 3. Realisasi Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

Berdasarkan Gambar diatas, produksi perikanan budidaya terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Kenaikan produksi perikanan budidaya yang terbesar adalah pada tahun 2019 yakni sebesar 13.611 ton dari 95.937 ton menjadi 109.548 ton. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 89.556 ton akibat adanya pandemi covid-19. Sedangkan pada produksi perikanan tangkap cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga 2017 namun pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan produksi. Akan tetapi tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 6.545 ton meskipun adanya pandemi covid-19. Hal ini disebabkan karena cuaca di perairan selatan DIY yang kurang baik untuk nelayan ketika akan melaut sehingga pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan sebesar 445 ton dari 6.815 menjadi 6.370 ton.

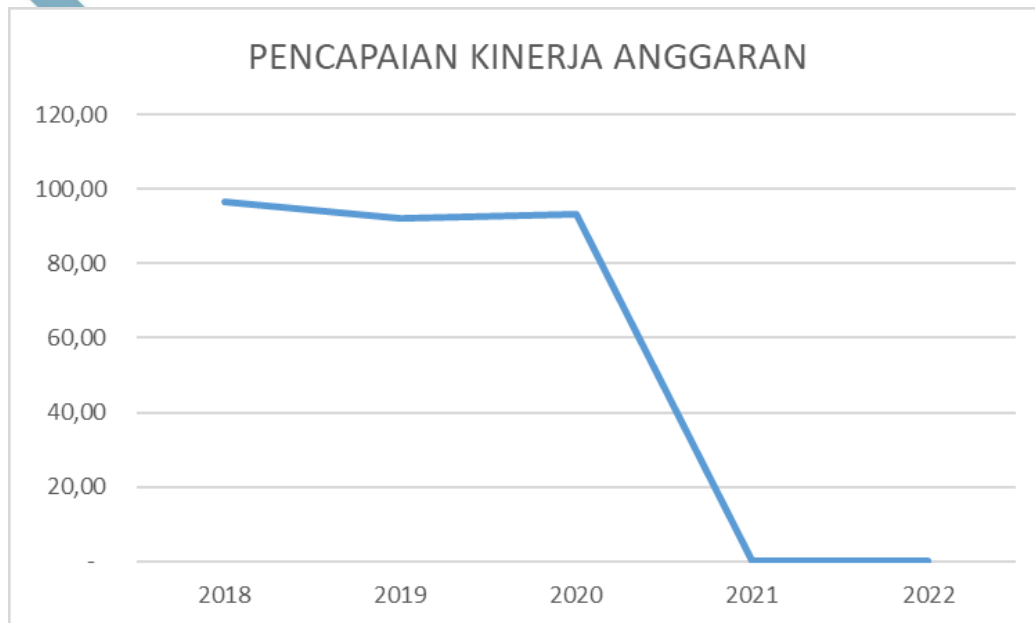
Kinerja tidak hanya dilihat dari pencapaian kinerja pelaksanaan saja, namun juga juga kinerja anggarannya. Logikanya penyerapan anggaran akan mempengaruhi pelaksanaan program. Semakin besar serapan anggaran, maka semakin bagus kinerjanya, meskipun dalam beberapa kasus terjadi pencapaian tinggi dengan anggaran yang kecil. Hal tersebut dapat terjadi karena efisiensi atau ada dukungan kebijakan dari instansi lain. Untuk melihat kinerja anggaran, dapat dilihat pada rasio kinerja dan anggaran berikut ini:

**Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan DIY**

No	Program/ Kegiatan	Target					Realisasi					Rasio				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.659.486.221	4.209.772.427	3.714.919.060	4.291.503.000	5.248.990.000	3.431.683.128	3.950.502.453	3.447.989.280	-	-	93,77	93,84	92,81	-	-
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.761.349.000	4.933.928.496	1.249.005.000	2.502.800.000	5.337.400.000	1.725.506.270	4.524.312.141	1.247.080.300	-	-	97,96	91,69	99,84	-	-
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	382.434.050	441.722.200	97.737.000	160.680.000	600.000.000	382.103.800	439.010.800	97.722.000	-	-	99,91	99,38	99,98	-	-
4	PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN	159.646.360	178.000.000	91.118.750	260.300.000	1.000.000.000	147.018.700	166.264.294	91.118.750	-	-	92,09	93,40	100	-	-
5	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	1.079.604.800	1.718.546.500	407.147.520	3.142.240.000	2.900.000.000	1.030.480.720	1.586.008.550	255.245.000	-	-	95,45	92,28	62,69	-	-
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	2.661.957.050	4.565.336.600	1.172.051.800	2.827.050.000	2.300.000.000	2.568.340.184	3.990.939.342	1.608.590.300	-	-	96,48	87,41	89,39	-	-
7	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	2.369.211.700	3.956.016.000	1.938.393.120	5.928.310.000	3.300.000.000	2.321.489.700	3.734.617.800	1.930.865.620	-	-	97,99	94,40	97,86	-	-

No	Program/ Kegiatan	Target					Realisasi					Rasio				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.725.400.100	3.562.333.897	1.992.061.510	3.540.000.000	3.700.000.000	2.644.679.300	3.428.410.193	1.991.452.850	-	-	97,04	96,24	99,96	-	-
9	PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.191.771.250	985.792.500	421.563.350	1.353.917.000	1.573.520.000	1.166.890.300	791.335.548	402.854.850	-	-	97,91	80,27	95,56	-	-
Rata-rata Pencapaian anggaran per tahun												96,51	92,10	93,12	-	-

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan rata-rata pencapaian anggaran berada pada level tinggi. Namun dengan anggaran yang kecil dengan pencapaian kinerja yang optimal, maka diindikasikan telah terjadi efisiensi anggaran atau ada kebijakan dari SKPD lain atau instansi lain dengan sasaran yang sama. Pada tahun 2019 pencapaian penyerapan anggaran sebesar 92,10 % sedangkan pada tahun 2020 sebesar 93,12 %. Jika pencapaian kinerja anggaran digambarkan, maka akan terlihat trend kenaikan dari tahun ke tahun.




Gambar 4. Grafik pencapaian kinerja anggaran

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pada pencapaian kinerja anggaran pada tahun 2019 dibandingkan dengan 2018. Pada tahun 2018 pencapaian kinerja anggaran sebesar 96,51 % sedangkan tahun 2019 sebesar 92,10 %. Capaian pada tahun 2019 tersebut disebabkan karena sisa lelang dari beberapa program/ kegiatan yang ada dalam satu tahun anggaran. Meskipun pencapaian anggaran tersebut belum maksimal, namun secara administrasi sudah semakin tertata dan semakin baik sehingga penganggaran dapat berjalan lancar dan kesalahan teknis dapat diminimalisir. Namun pada tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi 93,12 % meskipun terjadi pandemi covid-19.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah


Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan perikanan DIY sejauh ini berdasarkan data di atas secara umum telah mengalami peningkatan di beberapa bagian dari tahun ke tahun. Namun dinamika di lapangan dan masyarakat terus berkembang sehingga menciptakan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan. Tantangan yang muncul diantaranya adalah:

1. Wilayah pantai dan pesisir sebagai pintu depan wilayah DIY, sehingga memunculkan mindset among tani dagang layar.
2. Melakukan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

- 
3. Peningkatan produksi perikanan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat DIY yang sehat dan aman
 4. Pelaku usaha sektor perikanan tangkap dan budidaya lebih tertarik pada sektor lain, terutama sektor wisata.
 5. Terjadi alih fungsi lahan tambak di pesisir Kulon Progo karena pembangunan NYIA.
 6. Perubahan iklim dan cuaca menyebabkan produksi perikanan tidak pasti
 7. Meningkatkan kualitas produk perikanan yang berdaya saing tinggi.
 8. Menyediakan pelayanan kelautan dan perikanan lebih profesional.

Selain tantangan, peluang juga dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pelayanan SKPD, yaitu:

1. Peluang Visi Gubernur DIY yang berbunyi "Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Peluang yang dimaksud adalah dukungan politik dan kewenangan untuk melakukan pembangunan seluas-luasnya di laut dan pesisirnya.
2. Peluang dalam aspek hukum memberikan landasan hukum yang kuat dalam menjalankan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan, diantaranya: UU No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY; **Perda DIY No 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011-2030**; Pergub DIY No 38 Tahun 2011 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY.
3. DIY mempunyai garis pantai yang luas dan memungkinkan atau berpeluang untuk memproduksi garam. Peluang ini untukantisipasi kekurangan garam seperti tahun 2017 yang kemudian direspon oleh presiden, kementerian Kelautan dan sampai pada Gubernur DIY.
4. Perikanan darat masih sangat mungkin dikembangkan dengan optimal. Karena potensi didaerah-daerah tertentu masih sangat banyak dan belum di garap.
5. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk gemar makan ikan sehingga pola konsumsi ikan meningkat, sehingga pangsa pasar ikan semakin meningkat.

- 
6. Perubahan *mindset* baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, bahwa pembangunan kelautan lebih diutamakan dari pada di darat, karena potensi dilaut belum banyak dimanfaatkan.
 7. Pertumbuhan sektor pariwisata membutuhkan input dari sektor perikanan dalam mendukung penyediaan makan minum
 8. Pengintegrasian dengan pertanian melalui sistem mina padi maupun integrasi dengan sektor kehutanan melalui budidaya ikan di kawasan hutan dapat meningkatkan produksi perikanan
 9. Permintaan dari industri pengolahan ikan non makanan (kosmetik, medis, kerajinan)



Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. Produksi perikanan tangkap terkendala oleh kuantitas dan kualitas SDM, kualitas-kuantitas dan kapasitas alat tangkap, terkendala cuaca dan perubahan iklim sehingga hasil belum optimal.
2. Belum beroperasinya Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, yang diperkirakan akan mampu menunjang peningkatan produksi perikanan tangkap di DIY.
3. Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat karena ketidakpastian penghasilan, sehingga profesi nelayan dilakukan hanya sambilan dan pilihan pekerjaan terakhir.
4. Terjadinya trend laju percepatan alih fungsi lahan pertanian (termasuk lahan usaha perikanan) menjadi lahan perumahan, pemukiman, dan industri serta peruntukan lainnya pada beberapa tahun terakhir, akan berpotensi pada penurunan ketersediaan produk perikanan bagi masyarakat.
5. Penanaman mindset among tani dagang layar, menuju abad samudra hindia tidak bisa instan, hal ini perlu dibarengi dengan kebijakan-kebijakan strategis berkelanjutan yang terintegrasi antar bidang dan antar sektor.
6. Tumpang tindih kewenangan terkait pengelolaan mangrove antara kehutanan, BLH, kelautan.
7. Belum terkelolanya secara optimal pesisir dan laut 0-12 mil DIY.
8. Kemiskinan nelayan masih tinggi dan ketimpangan ekonomi juga masih tinggi antara wilayah nelayan dengan wilayah daratan.
9. Pandemi Covid 19 ini sangat berdampak pada usaha kelautan dan Perikanan dikarenakan sektor budidaya tidak bisa memasarkan produknya ke Restoran, Catering dan Hotel yang tutup, sedangkan untuk sektor tangkap terdampak pada ekspor ikan-ikan ekonomis tinggi seperti bawal, layur dan lobster yang kesulitan transportasinya.
10. Bidang pemasaran juga agak terhambat karena banyak event pameran yang dibatalkan, sedangkan pengolahan ikan justru naik daun karena banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang Work From Home.



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi : pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan budidaya, tangkap, dan pengolahan hasil perikanan; pengembangan teknologi perikanan budidaya; pengelolaan pelabuhan perikanan pantai; perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.


Visi Gubernur dalam lima tahun mendatang (2017-2022) adalah *"Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"*. Kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang Misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia". Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY dapat diejawantahkan dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban

Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1,2 dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemerintah Daerah DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup-kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek : Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan; Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Gini Index), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (index williamson); Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.


- 2) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;

Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan



mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya pewujudan misi kedua sekurangnya dengan :

- a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).
- b. Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Etos, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan perubahan persepsi (mind set) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantor, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang menyandang arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan adanya pergeseran mind set, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang



"diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Scandinavia dan Jepang, adalah contoh negara yang memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi

Adanya potensi yang besar tersebut menjadikan tantangan dan sekaligus peluang yang harus dicermati oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Peran dinas kelautan dan perikanan dapat menjadi punggawa karena kelautan merupakan wilayah kerjanya sesuai kewenangan bidangnya.


3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah "Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional". Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk dapat memaksimalkan hasil yang akan dicapai dalam Renstra DKP 2017-



2022 maka perlu menyandingkan dengan Renstra Dinas Kabupaten/Kota sebagai berikut :

3. Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2016-2021

Visi dari Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya Kedaulatan Pangan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Pertanian dan Perikanan. Hal ini sudah sesuai dengan Visi pemda DIY sehingga sudah ada benang merah yang menghubungkan target kinerjanya. Hal ini juga sudah sesuai dengan misi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang pertama dan kedua yaitu Meningkatkan Ketersediaan, Keragaman, dan Keterjangkauan Pangan Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Daya Saing Usaha Pertanian dan Perikanan. Indikator sasaran yang sama dengan Pemda DIY meliputi Peningkatan produksi pangan yang berkualitas, Peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian dan perikanan, Peningkatan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian dan perikanan yang professional.

4. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021

Tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul yaitu Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya yang ditandai dengan : Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya, Optimalnya Produksi Perikanan Tangkap, Meningkatnya Kualitas Kelompok Masyarakat Pesisir, Meningkatnya Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Tawar, Kelompok Masyarakat Kelautan Dan Perikanan Yang Mandiri Dan Sejahtera

Tujuan yang kedua yaitu mewujudkan diversifikasi dan pangsa pasar produk hasil kelautan dan perikanan dengan cara Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat. Sedangkan tujuan yang ketiga yaitu mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan yang ditandai dengan: Pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan meningkat, Kelompok masyarakat pengawas perikanan meningkat, Berkurangnya tingkat pelanggaran.

Sasaran Utama dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul adalah: Pendapatan Masyarakat Perikanan Meningkat (Nilai Pendapatan Perikanan Budidaya dan Nilai Pendapatan Nelayan), Produksi Perikanan



Budidaya Meningkatkan, Produksi Perikanan Tangkap Meningkatkan.

Sedangkan Sasaran Pendukung dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul adalah: Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Meningkatkan, Kesesuaian Program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkatkan.

5. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo tahun 2016-2021

Tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo ialah Terwujudnya peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya dengan Sasaran meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya.

6. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta tahun 2016-2021

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta adalah “ Meningkatkan Ketersediaan dan Mutu Pangan”. Sasaran yang ditetapkan Dinas Pertanian dan Pangan sama dengan Tujuan yang hendak dicapai yaitu “ Ketersediaan dan Mutu Pangan Meningkatkan “.

7. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tahun 2016-2021

Tujuan dan Sasaran dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman adalah: Memperkuat tata kelola Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh SKPD), Meningkatnya daya saing sektor pertanian (Meningkatnya kesejahteraan petani), dan Perlindungan dan Konservasi sumber daya alam (Perlindungan dan konservasi sumber daya alam). Faktor-faktor penghambat dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah antara lain kemampuan dan kewenangan yang ada di Kabupaten / Kota yang aggarannya terbatas.

Faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah yaitu sudah sinkronnya program dan kegiatan yang sudah satu tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan.



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah DIY ditetapkan melalui Perda no 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009 - 2029. Dalam penyusunannya Rencana Tata Ruang Wilayah DIY juga telah disesuaikan dengan RTRWN, RTRW Jawa-Bali dan RTRW wilayah berbatasan (Jawa Tengah). Sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah DIY, telah disusun Rencana Rinci dengan kedalaman 1:5000 khusus pada kawasan strategis, baik kawasan strategis nasional, kawasan strategis jawa-bali maupun kawasan strategis provinsi.

Terkait kelautan dan perikanan maka DIY juga sudah mempunyai Perda DIY no 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030 yang telah diperbaharui dengan Perda 9 Tahun 2018 , Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sumberdaya sangat potensial. Untuk meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan konsep dan strategi pengelolaan secara profesional dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai instansi teknis terkait, disertai peran serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat.

Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY merupakan hasil integrasi dari dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun regional sektor Kelautan dan Perikanan. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY inilah yang akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di DIY selama rentang waktu 2017-2022 hingga di tingkat kabupaten/kota.



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan visi misi dan renstra serta dokumen pendukung yang ada maka ditentukan isu strategis kelautan perikanan yang meliputi :

1. Pembangunan dan rencana operasional NYIA harus disikapi dengan bijaksana dan tepat, terutama tentang pengelolaan wilayah sekitar Bandara.
2. Kebutuhan yang mendesak untuk beroperasinya Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta sebagai wilayah dukung pertumbuhan ekonomi berbasis nelayan belum dapat terpenuhi, sehingga perlu alternatif pengembangan pelabuhan perikanan yang telah memenuhi syarat kelayakan, antara lain di Gesing, Ngrenehan, dan Pandansimo.
3. Peningkatan standarisasi, sertifikasi mutu dan keamanan produk perikanan agar mempunyai daya saing yang tinggi
4. Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat karena ketidakpastian penghasilan, sehingga profesi nelayan dilakukan hanya sambilan dan pilihan pekerjaan terakhir. Maka perlu upaya untuk membangun generasi nelayan yang baru, yang lebih baik kualitasnya dan semangatnya.
5. Koordinasi masih kurang optimal, baik antar bagian maupun antar seksi, baik dalam pelaksanaan program di lapangan maupun dalam perencanaan.
6. Produksi perikanan tangkap terkendala oleh kualitas SDM, kualitas-kuantitas dan kapasitas alat tangkap, serta terkendala cuaca dan perubahan iklim sehingga hasil belum optimal.
7. Terjadinya trend laju percepatan alih fungsi lahan pertanian (termasuk lahan usaha perikanan) menjadi lahan perumahan, pemukiman, dan industri serta peruntukan lainnya pada beberapa tahun terakhir, akan berpotensi pada penurunan ketersediaan produk perikanan bagi masyarakat.
8. Penanganan sektor kelautan dan perikanan yang terdampak covid 19 seperti pembudidaya, nelayan dan pemasar.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017-2022 dan analisis isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam kurun waktu 2017-2022 adalah:

Tabel 8. Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Tumbuhnya perekonomian DIY dari sektor kelautan dan perikanan (indicator: meningkatnya PDRB subsektor perikanan sebesar 3,6% dari sebesar Rp. 320.348 juta pada tahun 2017 menjadi Rp. 331.897 juta pada tahun 2022)	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) (juta rupiah)	318.947	322.136	325.357	328.611	331.897
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan (indicator peningkatan status kawasan konservasi dari tahun 2017 sebesar 0% menjadi 100 % pada tahun 2022)	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi (%)	20	30	60	80	100



Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan kebijakan. Dengan adanya Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu dilakukan langkah-langkah dan tindakan untuk mencegah dan mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan. Termasuk dalam perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautandan Perikanan DIY.

Sesuai dengan Strategi dan arah Kebijakan Operasi Covid 19 di DIY untuk menjaga dan menciptakan kondusifitas di wilayah DIY maka diperlukan pengawasan dan pengendalian logistik dengan penyiagaan cadangan kebutuhan pangan. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyiagaan cadangan kebutuhan pangan melalui produk olahan hasil perikanan, terutama untuk penduduk berkategori miskin di DIY. Selain untuk pemenuhan gizi masyarakat dalam meningkatkan imunitas , penyediaan produk olahan hasil perikanan juga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui pembelian hasil tangkapan nelayan maupun hasil budidaya ikan serta industri kecil pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan.

Adapun strategi dan kebijakan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Strategi dan Kebijakan Tujuan Pertama (Tumbuhnya perekonomian DIY dari sektor kelautan dan perikanan)

a. Strategi

- 1) Penguatan fondasi pada SDM aparatur dan masyarakat, kelembagaan dan sarana prasarana kelautan dan perikanan
- 2) Penguatan daya saing pelaku usaha kelautan dan perikanan

b. Kebijakan

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat kelautan dan perikanan, meningkatkan manajemen kelembagaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta penerapan IPTEK
- 2) Peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap dan olahan yang berdampak bagi peningkatan pendapatan masyarakat
- 3) Meningkatkan kualitas hasil budidaya, tangkap dan produk.
- 4) mengembangkan sistem pemasaran yang modern

5) Pendampingan dan pengawalan kelompok

2. Strategi dan Kebijakan Tujuan Kedua (Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan)

a. Strategi

- 1) Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
- 2) Pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan secara terintegrasi

b. Kebijakan

- 1) Memberdayakan potensi alam dan masyarakat berwawasan lingkungan
- 2) Menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan
- 3) Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Tabel 9. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tumbuhnya perekonomian DIY dari sektor kelautan dan perikanan	Meningkatnya nilai produksi perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan fondasi pada SDM aparatur dan masyarakat, kelembagaan dan sarana prasarana kelautan dan perikanan 2. Penguatan daya saing pelaku usaha kelautan dan perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat kelautan dan perikanan, meningkatkan manajemen kelembagaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta penerapan IPTEK 2. Peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap dan olahan yang berdampak bagi peningkatan pendapatan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas hasil budidaya, tangkap dan produk. 4. mengembangkan sistem pemasaran yang modern 5. Pendampingan dan pengawalan kelompok
Meningkatnya kualitas pengelolaan	Terkelolanya kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan potensi sumberdaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan potensi alam dan masyarakat berwawasan



sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	konservasi perairan	kelautan dan perikanan yang berkelanjutan 2. Pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan secara terintegrasi	lingkungan 2. Menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan 3. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan
---	---------------------	--	--



Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam program kerja

tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan program yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya


Perikanan budidaya merupakan kontributor utama produksi perikanan DIY dengan kontribusi melebihi 90%. Di sisi lain masih terdapat berbagai permasalahan diantaranya alih fungsi lahan pertanian, kurang optimalnya sarana prasarana perikanan budidaya serta kurangnya SDM perikanan dan kurang optimalnya kelembagaan pembudidaya ikan. Selain itu, ketersediaan ikan DIY masih banyak dipasok dari luar DIY. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan budidaya dalam menjamin ketersediaan pangan daerah dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu. Disamping itu juga harus menyiapkan produk perikanan yang dijual keluar daerah.

Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:

- 1) pelatihan budidaya perikanan
- 2) pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya
- 3) pendampingan kelembagaan perikanan budidaya
- 4) pendampingan standarisasi dan sertifikasi perikanan budidaya

2. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Potensi Perikanan tangkap, terutama perikanan tangkap laut di selatan Jawa mempunyai nilai potensi lestari sebesar 320.000 ton/tahun, namun tingkat pemanfaatan potensi perikanan tangkap laut oleh nelayan DIY baru sekitar 2%. Di sisi lain masih terdapat berbagai permasalahan diantaranya kurangnya sarana prasarana perikanan tangkap (kapal, alat penangkapan ikan dan pelabuhan) serta kurangnya



kuantitas dan kualitas SDM nelayan dan kurang optimalnya kelembagaan nelayan. Selain itu, ketersediaan ikan DIY masih banyak dipasok dari luar DIY. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan tangkap dalam menjamin ketersediaan pangan daerah dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu.

Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:


- 1) pelatihan perikanan tangkap bagi nelayan
 - 2) pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap (pelabuhan perikanan, kapal, alat penangkapan ikan)
 - 3) pendampingan kelembagaan nelayan
 - 4) pendampingan standarisasi dan sertifikasi perikanan tangkap
3. Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Keberadaan DIY sebagai daerah tujuan wisata dan pendidikan meningkatkan kebutuhan terhadap produk perikanan. Sementara di sisi lain, tingkat konsumsi ikan DIY masih tergolong rendah walaupun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, ketersediaan produk perikanan masih banyak dipasok dari luar DIY. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk olahan ikan dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat DIY.

Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:

- 1) pelatihan pengolahan dan pemasaran produk perikanan
 - 2) kampanye/sosialisasi memasyarakatkan makan ikan
 - 3) pengembangan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
 - 4) pendampingan kelembagaan pengolah dan pemasar
 - 5) pengujian mutu hasil perikanan
 - 6) pendampingan standarisasi dan sertifikasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
4. Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya merupakan kontributor utama produksi perikanan DIY dengan kontribusi melebihi 90%. Oleh karena itu dibutuhkan ketersediaan benih unggul perikanan budidaya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas benih perikanan budidaya dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu. Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:

- 
- 1) pengembangan sarana prasarana perbenihan perikanan budidaya
 - 2) pengendalian penyakit ikan
 - 3) standarisasi dan sertifikasi perbenihan perikanan budidaya
5. Pengelolaan Pelabuhan

Kegiatan perikanan tangkap di laut selatan DIY saat ini masih memiliki potensi yang besar diikuti dengan permintaan konsumen akan ikan di DIY dan luar DIY semakin tinggi, namun sampai saat ini dalam pemanfaatan SDI belum dapat optimal. Salah satu penyebabnya yaitu belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana pelabuhan perikanan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan dan kualitas pelayanan pelabuhan sesuai dengan standar operasional prosedur.

Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:

- 1) pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana pelabuhan perikanan (pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pokok, fungsional dan pendukung pelabuhan)
 - 2) pembinaan pengelolaan pelabuhan (sosialisasi; pelatihan; bimtek; fasilitasi: jasa kepelabuhan, pemanfaatan lahan dan usaha, pembinaan mutu, pengolahan, pemasaran, distribusi hasil tangkapan, dan perkarantinaan).
 - 3) pelayanan pelabuhan (penerbitan surat persetujuan berlayar, penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, SKA, fasilitasi perijinan kapal, tambat labuh, inspeksi pembongkaran ikan, perbekalan, navigasi, pemanfaatan lahan dan usaha, pelayanan jasa kepelabuhan)
6. Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

DIY mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, namun pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan masih ada yang tidak sesuai dengan kaidah keberlanjutan dengan adanya penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan. Selain itu, wilayah pesisir DIY mengalami tantangan abrasi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, program ini ditujukan untuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta mengendalikan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan terutama di pesisir sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:

- 1) rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan
- 2) pembinaan pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan pesisir

3) pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di darat maupun laut

7. Penanganan dan pemulihan ekonomi pasca Covid 19

Sektor kelautan dan perikanan yang terdampak covid 19 harus segera kita bantu dengan program-program yang menasar langsung ke pelaku usaha. Untuk itu kegiatan yang ada sudah diarahkan sasarannya untuk masyarakat yang terdampak sehingga bisa mengurangi beban yang ada. Tindakan preventif segera dilakukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan layanan dasar barang dan jasa serta kebijakan lainnya yang dianggap perlu melalui upaya realokasi anggaran bidang Kelautan dan Perikanan untuk difokuskan dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga diharapkan mampu mendukung dan memperkuat upaya social distancing dan work from home (WFH) sebagai salah satu metode untuk menekan pertumbuhan statistik pasien covid-19 dengan memberikan kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya-upaya tersebut.

Tabel 10. Indikator Kinerja Program Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

No	Sasaran (Renstra)	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
4		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5		PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN	nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan (milyar rupiah)	32,84	33,31	34,78	35,25	36,73
6		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	produksi perikanan tangkap (ton)	5.817	6.199	6.481	6.863	7.063
7		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	1. tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/ kap/ thn)	N/A	24,55	25,21	25,48	26,05
			2. produksi produk perikanan olahan (kg)	8.201	N/A	N/A	N/A	N/A
8	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN	produksi perikanan budidaya (ton)	89.336	89.400	89.500	89.600	89.700	



No	Sasaran (Renstra)	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
		BUDIDAYA						
9		PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA	1. Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	N/A	84	86	88	90
			2. Produksi benih kan yang bersertifikat	31,3	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	14	14	14	14	14
			2. Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	10	10	10	10	10

Tabel 11. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Tumbuhnya perekonomian DIY dari sektor kelautan dan perikanan	Meningkatkan nilai produksi perikanan	Semula	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	100%	3,604,922	100%	4,421,259	100%	3,749,569	100%	4.280.826	100%	4.565.940	100%	20,622.516	DKP	DIY
		Semula	A. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	a. alat listrik dan elektronik b. alat tulis kantor c. Barang cetakan d. Belanja penggandaan dan penjilidan e. majalah f. materai g. Pembayaran air bersih h. pembayaran jasa kebersihan kantor i. pembayaran retribusi sampah j. Pembayaran tagihan listrik k. pembayaran tagihan telepon l. pengiriman dokumen m. peralatan kebersihan dan bahan pembersih n. perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 2 o. perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 3 p. perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda	100%	100%	1,722,769	100%	1,946,319	100%	1,988,724	100%	1.994.631	100%	2,140,950	100%	9,793,393	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
				4 q. surat kabar															
		Semula	B. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	a. Bukti pembayaran honorarium perencana program b. Bukti pembayaran jasa keamanan kantor c. Bukti Pembayaran Jasa Pengelola Keuangan/Barang/Kepegawaian	100%	100%	1,682,154	100%	2,011,955	100%	1,458,247	100%	1.487.340	100%	1.500.000	100%	6,641,196	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Semula	C. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat b. Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah c. Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	100%	100%	200,000	100%	462,985	100%	499,316	100%	798.855	100%	924,990	100%	2,886,146	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Semula	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD.	100%	100%	1,481,224	100%	3,662,645	100%	1,249,005	100%	2.002.800	100%	3.778.800	100%	12,174,474	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Semula	A. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	a. rehab kamar mandi dinas b. rehab kolam BAT sendangsari c. rehab rumah genset d. sumur pantek BAP Congot (BPTPB) e. Sumur pantek BAT sendangsari f. rehab kolam BAP Congot g. Rehab kolam hatchery selatan	100%	100%	n/a	100%	1.845.317	100%	108.880	100%	908.840	100%	1.500.000	100%	4,368,037	DKP	DIY
		Semula	B. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	a. Perlengkapan Kantor b. Peralatan Kantor c. Mebeleur	100%	100%	n/a	100%	856,256	100%	299,546	100%	278,680	100%	506.400	100%	1,940,882	DKP	DIY
		Semula	C. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	a. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	100%	100%	190,000	100%	266,612	100%	230,438	100%	89,680	100%	506,400	100%	1,283,130	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Semula	D. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	a. Kendaraan Roda 2 Terpelihara b. Kendaraan Roda 3 Terpelihara c. Kendaraan Roda 4 Terpelihara	100%	100%	500,000	100%	583,944	100%	523,071	100%	584,645	100%	949,500	100%	3,141,160	DKP	DIY
		Semula	E. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	a. Perlengkapan Kantor Terpelihara b. Peralatan Kantor Terpelihara c. Mebeleur Terpelihara	100%	100%	59,935	100%	110,516	100%	87,070	100%	140,955	100%	316,500	100%	714,976	DKP	DIY
		Semula	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Terwujudnya Penata Usahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD.	100%	100%	392,465	100%	483,445	100%	97,737	100%	173.680	100%	245.000	100%	1,392,327	DKP	DIY
		Semula	A. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, IKU) paling lambat akhir Februari 2021.	100%	100%	5,000	100%	5,000	100%	5,000	100%	5,000	100%	7,000	100%	27,000	DKP	DIY
		Semula	B. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	a. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program dan 25 kegiatan	100%	100%	24,993	100%	35,453	100%	21,045	100%	32,000	100%	60,000	100%	173,491	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Semula	C. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	a. Data Produksi Perikanan dan Kelautan 1 Tahun b. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku c. Forum Perencanaan OPD 1 kali.	100%	100%	312,472	100%	365,853	100%	50,980	100%	90,840	100%	100,000	100%	920,145	DKP	DIY
		Semula	D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	a. Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 25 kegiatan	100%	100%	50,000	100%	77,139	100%	20,712	100%	45,840	100%	78,000	100%	78,000	DKP	DIY
		Menjadi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	22.192.256	100%	23.710.643	100%	23.710.643	DKP	DIY
		Menjadi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	124.084	100%	134.400	100%	134.400	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Pena nggu ng-jawab	L o k a s i
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	20	
		Menjadi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	a. DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku b. forum perencanaan OPD c. Forum Rekonsiliasi Eksekutif dan Legislatif d. ROPK, Renja, dan renstra yang sesuai dengan aturan yang berlaku e. Tersusunnya ROPK 2022 f. Tersusunnya dokumen renstra 2022 g. Tersusunnya dokumen renja perubahan 2022 h. Tersusunnya dokumen renja 2022 i. Tersusunnya data produksi perikanan dan kelautan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 2 dokumen b. 1 kali c. 1 kali d. 3 dokumen	76.244	83.957	a.N/A b. N/A c. N/A d. N/A e. 1 dokumen f. 1 dokumen g. 1 dokumen h. 1 dokumen i. 1 dokumen	83.957	a.N/A b. N/A c. N/A d. N/A e. 1 dokumen f. 1 dokumen g. 1 dokumen h. 1 dokumen i. 1 dokumen	DKP	DIY	
		Menjadi	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen penganggaran sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. RKA Tahun 2023 2. DPA Tahun 2023 3. RKA-Perubahan Tahun 2022 4. DPPA Tahun 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.032	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	12.032	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	DKP	DIY	
		Menjadi	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dokumen perencanaan (RPJMD, renstra, IKU) b. Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan c. Tersusunnya dokumen LKJIP yang capaian kerjanya sesuai dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 100% b. 100%	47.840	38.410.750	a.N/A b. N/A c. 1 dokumen d. 1 dokumen e. 1 dokumen	38.410.750	a.N/A b. N/A c. 1 dokumen d. 1 dokumen e. 1 dokumen	DKP	DIY	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	20
				perencanaan (RPJMD, renstra, IKU) paling lambat akhir Februari 2022 d. Tersusunnya konsep/bahan LPPD e. Tersusunnya konsep/bahan LKPJ															
		Menjadi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	16.011.131	100%	18.719.724	100%	18.719.724	DKP	DIY
		Menjadi	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	15.828.831	a.N/A b. 1 tahun	18.568.502	a.N/A b. 1 tahun	18.568.502	DKP	DIY
		Menjadi	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Kepegawaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31 orang	150.300	N/A	N/A	N/A	N/A	DKP	DIY
		Menjadi	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	109.260	1 tahun	109.260	DKP	DIY
		Menjadi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokumen (audit ed dan unau dited)	7.648	2 Dokumen (audit ed dan unau dited)	7.648	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Pena nggu ng-jawab	L o k a s i
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
		Menjadi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	a. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan b. Laporan Keuangan bulanan c. Laporan Keuangan Triwulan d. Laporan Keuangan Semester"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	32.000	a.N/A b. 12 dokumen c. 4 dokumen d. 2 dokumen	34.313	a.N/A b. 12 dokumen c. 4 dokumen d. 2 dokumen	34.313	DKP	DIY	
		Menjadi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	20.254.976	100%	20.254.976	DKP	DIY	
		Menjadi	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	41.400	1 tahun	41.400	DKP	DIY	
		Menjadi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	925.913	100%	551.327	100%	551.327	DKP	DIY	
		Menjadi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 jenis	25.609	12 jenis	30.879	12 jenis	30.879	DKP	DIY	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Menjadi	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	42 Jenis	84.498	42 Jenis	84.498	DKP	DIY
		Menjadi	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22 jenis	76.080	25 jenis	73.719	25 jenis	73.719	DKP	DIY
		Menjadi	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengisian dan pemeliharaan APAR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 RAB	6.750	1 RAB	6.750	DKP	DIY
		Menjadi	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	a. Barang cetakan b. Penggandaan c. Penjilidan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a.14 jenis b. 194.00 lembar c. 225 eksemplar	82.462	a. 11 jenis b. 97.00 lembar c. 225 eksemplar	58.605	a. 11 jenis b. 97.00 lembar c. 225 eksemplar	58.605	DKP	DIY
		Menjadi	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	a. majalah b. surat kabar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 1 jenis b. 8 jenis	16.260	a. N/A b. 2 jenis	4.776	a. N/A b. 2 jenis	4.776	DKP	DIY
		Menjadi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat b. Koordinasi dan konsultasi dalam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 7520 OS	725.502	a.N/A b. N/A	275.054	a.N/A b. N/A	275.054	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			dan Konsultasi SKPD	daerah c. Koordinasi dan konsultasi luar daerah d. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi e. Tersedianya makanan dan minuman rapat f. Terkelolanya arsip dinas								b. 12 bulan c. 12 bulan		c. N/A d. 1 tahun e. 1 tahun f. 1 tahun		c. N/A d. 1 tahun e. 1 tahun f. 1 tahun			
		Menjadi	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terkelolanya website OPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	17.046	1 tahun	17.046	DKP	DIY
		Menjadi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	275.828	100%	11.111	100%	11.111	DKP	DIY
		Menjadi	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a. Pengadaan Komputer/Notebook b. Pengadaan Printer c. Pengadaan Genset d. Pengadaan Hi-Blow e. Pengadaan Kincir Air f. Komputer g. Laptop h. Sound system i. Printer j. CCTV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 2 unit b. 2 unit c. 1 unit d. 8 unit e. 10 unit	258.828	a. N/A b. N/A c. N/A d. N/A e. N/A	1.432	a. N/A b. N/A c. N/A d. N/A e. N/A	1.432	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
				k. Perangkat multimedia virtual meeting l. Harddisk m. Kamera										f. N/A g. N/A h. N/A i. N/A j. N/A k. 1 RAB l. N/A m. N/A		f. N/A g. N/A h. N/A i. N/A j. N/A k. 1 RAB l. N/A m. N/A			
		Menjadi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a. Rak Arsip b. Pompa air c. Kereta sampah/tempat sampah d. AC e. Filling Cabinet f. Lemari Besi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 1 unit b. 2 unit	17.000	a. N/A b. 1 unit c. 1 unit d. N/A e. N/A f. N/A	9.679	a. N/A b. 1 unit c. 1 unit d. N/A e. N/A f. N/A	9.679	DKP	DIY
		Menjadi	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	320.209.000	1 unit	320.209.000	DKP	DIY
		Menjadi	Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	3.227.320	100%	3.404.228	100%	3.404.228	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
			Urusan Pemerintahan Daerah																	
		Menjadi	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	a. Alat Tulis Kantor b. Pengiriman Dokumen c. Materai d. Surat masuk e. Surat keluar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a.50 jenis b. 12 bulan c. 1 jenis	100.131	a.N/A b. 1 tahun c. 1 jenis d. 1 tahun e. 1 tahun	9.035	a.N/A b. 1 tahun c. 1 jenis d. 1 tahun e. 1 tahun	9.035	DKP	DIY	
		Menjadi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	a. Pembayaran Tagihan Listrik b. Pembayaran Tagihan Telepon c. Pembayaran Tagihan Air Bersih d. Pembayaran langganan virtual meeting e. Tambah daya UK-BAP Samas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 12 bulan b. 12 bulan c. 12 bulan d. N/A	1.135.190	a. 1 tahun b. 1 tahun c. 1 tahun d. 1 tahun e. 1 unit	1.269.191	a. 1 tahun b. 1 tahun c. 1 tahun d. 1 tahun e. 1 unit	1.269.191	DKP	DIY	
		Menjadi	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Bukti pembayaran jasa keamanan kantor b. Bukti pembayaran jasa kebersihan kantor c. Bukti pembayaran jasa retribusi sampah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 12 bulan b. 12 bulan c. 12 bulan	1.991.999	a. 1 tahun b. 1 tahun c. 1 tahun	2.126.001	a. 1 tahun b. 1 tahun c. 1 tahun	2.126.001	DKP	DIY	
		Menjadi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	1.627.977	100%	848.152	100%	848.152	DKP	DIY	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Pena nggu ng-jawab
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			Urusan Pemerintahan Daerah																
		Menjadi	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Terbayarnya pajak kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.1 unit 2.1 unit	61.915	1.1 unit 2.1 unit	61.915	DKP	DIY
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Terbayarnya Pajak kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan c. Terbayarnya Biaya Perizinan (KIR) kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a.36 unit b. 4 unit c. 21 unit	618.850	a.61 unit b. 61 unit c. 61 unit	636.565	a.61 unit b. 61 unit c. 61 unit	636.565	DKP	DIY
		Menjadi	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a. Peralatan kantor terpelihara b. Pemeliharaan Jaringan Internet c. Pemeliharaan laptop d. Pemeliharaan komputer e. Pemeliharaan printer	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 6 jenis b. 1 paket	64.330	a. N/A b. 1 RAB c. 1	61.032	a. N/A b. 1 RAB c. 1	61.032	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Penanggung-jawab		
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
				f. Pemeliharaan proyektor g. Pemeliharaan sound system										RAB d. 1 RAB e. 1 RAB f. 1 RAB g. 1 RAB h. 1 RAB		RAB d. 1 RAB e. 1 RAB f. 1 RAB g. 1 RAB h. 1 RAB					
		Menjadi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	a. Pemeliharaan pavingblok b. Pemeliharaan saluran air lingkungan kantor c. Pemeliharaan talang air d. Rehabilitasi kamar mandi dinas e. Rehabilitasi kanopi f. Rehab Hatchery Selatan UK BAT Cangkringan g. Rehab Kolam Ikan Hias Cangkringan h. Rehab Kolam UK BAP Congot i. Rehab Kolam UK BAT Sendangsari j. Rehab Pagar BPTPB k. Pengerukan selokan PPP Sadeng l. Rehab atap TPI Pelabuhan Tanjung Adikarta m. Rehab Rumah Dinas Sagan n. Pengecatan Gedung Kantor Dinas o. Pemeliharaan Taman Dinas p. Pemeliharaan Plafon Dinas q. Pengecatan Gedung Kantor PPP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	816.811	a.1 paket b. 1 paket c. 1 paket d. 1 paket e. 1 paket f. 1 paket g. 1 paket h. 1 paket i. 1 paket j. 1 paket	816.811	a.N/A b. N/A c. 1 RAB d. N/A e. N/A f. N/A g. N/A h. N/A i. N/A j. N/A k. N/A l. N/A m.	2.373.446	a.N/A b. N/A c. 1 RAB d. N/A e. N/A f. N/A g. N/A h. N/A i. N/A j. N/A k. N/A l. N/A m.	2.373.446	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Pena nggu ng-jawab
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	20
				Sadeng r. Rehab Kantor Utama PPP Sadeng s. Rehap atap gedung perbengkelan PP Tanjung Adikarto t. Rehabilitasi Asrama BPTPB u. Rehab Atap Hatchery Wonocatur v. Rehab Hatchery Samas w. Pengecatan gedung kantor BPTPB x. Perbaikan fender dermaga pelabuhan dan tiang pancang kapal PPP Sadeng y. Wastafel BPTPB							k. 1 paket l. 1 paket		N/A n. N/A o. N/A p. 1 RAB q. N/A r. N/A s. N/A t. N/A u. N/A v. N/A w. N/A x. y. 1 RAB		N/A n. N/A o. p. 1 RAB q. N/A r. N/A s. N/A t. N/A u. N/A v. N/A w. N/A x. y. 1 RAB				
		Menjadi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a. Perlengkapan Kantor Terpeliharaan b. Pemeliharaan jaringan listrik c. Pemeliharaan CCTV D. Pemeliharaan AC e. Pemeliharaan genset f. Pemeliharaan pompa air	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 3 jenis b. 1 paket	87.985	a. N/A b. 1 RAB c. 1 RAB d. 1 RAB e. 1 RAB	57.520	a. N/A b. 1 RAB c. 1 RAB d. 1 RAB e. 1 RAB	57.520	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
														f. 1 RAB		f. 1 RAB			
		Menjadi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Instalasi Listrik UK BAP Congot	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 paket	40.000	N/A	N/A	1 paket	40.000	DKP	DIY
		Semula	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	76.875	89.336	2,200,032	89.400	4,414,623	89.500	1,973,043	89.600	4.086.232	89.700	4.800.000	89.700	17,473,930	DKP	DIY
		Semula	A. Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya	a. Pengembangan Perikanan Budidaya Lele b. Pengembangan Perikanan Budidaya Gurami c. Pengembangan Perikanan Budidaya Nila d. Pengembangan Perikanan Budidaya Ugadi e. Pengembangan Perikanan Budidaya Minapadi f. Pengembangan Budidaya Ikan Hias g. Pengembangan Budidaya Perikanan di bantaran Sungai	n/a	a. 43 kelo mpok b. 24 kelo mpok c. 29 kelo mpok d. 2 kelo mpok e. 3	2,200,032	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	a. 43 kelo mpok b. 24 kelo mpok c. 29 kelo mpok d. 2 kelo mpok e. 3	2.200.032	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						kelompok f. 2 kelompok g. 2 kelompok											kelompok f. 2 kelompok g. 2 kelompok		
		Semula	B. Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	a. Produksi perikanan budidaya, dari kelompok pemula b. Jumlah unit budidaya/kelompok yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPIB dan CBIB c. Jumlah Unit Pembenihan Rakyat yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPIB d. Jumlah sertifikat MPM CBIB	N/A	N/A	N/A	a. 24 ton b. 22 Unit Pemudidaya/kelompok	865,673	a. 20 ton b. 5 Unit Pemudidaya/kelompok	697,997	a. N/A b. 15 unit pemudidaya/kelompok c. 2 unit pembenihan rakyat (UPR) d. 7 sertifikat MPM CBIB	600.000	a. N/A b. 20 unit pemudidaya/kelompok c. 2 unit pembenihan rakyat (UPR) d. 7 sertifikat MPM CBIB	900.000	a. 44 ton b. 62 unit pemudidaya/kelompok c. 4 unit pembenihan rakyat (UPR) d. 14 sertifikat MPM CBIB	3,063,670	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Pena nggu ng-jawab
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	20
		Semula	C. Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	a. produksi perikanan budidaya, dari kelompok madya b. Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha perikanan Budidaya (antar UPR dengan Pembudidaya c. Produksi perikanan budidaya d. Pembentukan rintisan desa wisata	N/A	N/A	N/A	a. 40 ton b. 2 Doku men	3,548,950	a. 40 ton b. 0 Doku men	1,275,046	a. N/A b. 2 Doku men c. 100 ton d. 3 desa wisat a	3.486.232	a. N/A b. 2 Doku men c. 100 ton d. 3 desa wisat a	3.900.000	a. 80 ton b. 6 Doku men c. 200 ton d. 6 desa wisat a	12,210,228	DKP	DIY
		Semula	Program Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	Produksi benih kan yang bersertifikat (juta ekor)	n/a	31,3	2.858.229	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	31,3	2,858,229	DKP	DIY
		Semula	A. Pelayanan dan Pengendalian Penyakit Ikan	a. Rekomendasi Hasil Uji Hama dan Penyakit Ikan	n/a	n/a	166.431	a. 350 sampel	n/a	a. 150 sampel	n/a	a. 150 sampel	n/a	a. 150 sampel	n/a	a. 800 sampel	166.431	DKP	DIY
		Semula	B. Perbanyak Benih Induk, Benih Unggul, dan Teknologi Perikanan Budidaya Pengembangan	a. Benih Ikan dan Udang b. Calon Induk Ikan c. Petunjuk teknis perikanan budidaya	n/a	n/a	2.691.798	a. 32.845.000 ekor terdiri dari; nilasa :8.029.750 Mas	n/a	a. 4.489.959 ekor terdiri dari; Nilasa : 612.771	n/a	a. 4.489.959 ekor terdiri dari; Nilasa : 612.771	n/a	a. 4.489.959 ekor terdiri dari; Nilasa : 612.771	n/a	a. 4.489.959 ekor terdiri dari; Nilasa : 612.771	2.691.798	DKP	DIY



Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)							
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20					
			perbenihan perikanan budidaya Pengembangan perbenihan perikanan budidaya					Naja wa : 1.987 .840 Lele : 10.008 6.931 Gura mi : 1.646 .738 Tawes : 1.223 .741 Udan g Galah : 9.075 .000 Band eng : 875.000 b. 9.000 kg terdiri dari: Nilasa .694			ekor; Mas Naja wa: 13.508 ekor; Lele: 462.604 ekor; Gura mi: 618.420 ekor; Tawes : 925.962 ekor; Band eng : 316.000 ekor; Udan g Galah : 1.540 .694			ekor; Mas Naja wa: 13.508 ekor; Lele: 462.604 ekor; Gura mi: 618.420 ekor; Tawes : 925.962 ekor; Band eng : 316.000 ekor; Udan g Galah : 1.540 .694			ekor; Mas Naja wa: 13.508 ekor; Lele: 462.604 ekor; Gura mi: 618.420 ekor; Tawes : 925.962 ekor; Band eng : 316.000 ekor; Udan g Galah : 1.540 .694			ekor; Mas Naja wa: 13.508 ekor; Lele: 462.604 ekor; Gura mi: 618.420 ekor; Tawes : 925.962 ekor; Band eng : 316.000 ekor; Udan g Galah : 1.540 .694				

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
								: 7.180 kg Mas Naja wa : 540 kg Gura mi : 250 kg Lele : 1.030 kg		ekor		ekor		ekor		ekor		ekor		
								b. 5.257 kg terdiri dari: Nilasa : 3.200 kg Mas Naja wa: 157 kg Lele: 1.650 kg Gura mi: 250 kg		c. 2 Petunjuk Teknis		c. n/a		c. n/a		c. n/a		b. 5.257 kg terdiri dari: Nilasa : 3.200 kg Mas Naja wa: 157 kg Lele: 1.650 kg Gura mi: 250 kg		c. 2 Petunjuk Teknis

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Semula	Program Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	Persentase benih perikanan budidaya Bersertifikat yang terdistribusi (%)	N/A	N/A	N/A	84	3,500,000	86	1,992,061	88	3.540.000	90	3.630.000	90	12,662,061	DKP	DIY
		Semula	A. Pelayanan dan Pengendalian Penyakit Ikan	a. Rekomendasi Hasil Uji Hama dan Penyakit Ikan	N/A	N/A	N/A	a. 350 sampel	218,980	a. 150 sampel	194.207	a. 350 sampel	300.000	a. 200 sampel	300.000	1.220 sampel	1,013,187		
		Semula	B. Perbanyak Benih Induk, Benih Unggul, dan Teknologi Perikanan Budidaya Pengembangan perbenihan perikanan budidaya Pengembangan perbenihan perikanan budidaya	a. Benih Ikan dan Udang b. Calon Induk Ikan c. Petunjuk teknis	N/A	N/A	N/A	a. 32.845.000 ekor terdiri dari ; nilasa :8.029.750 Mas Naja wa : 1.987.840 Lele : 10.006.931 Gura mi : 1.646	3.373.353	a. 3.325.225 ekor terdiri dari ; nilasa : 400.000 mas najawa : 7.500 lele : 563.350 gura mi : 606.5	1.797.854	a. 29.303.977 ekor b. 8.030 kg	3.240.000	a. 30.769.176 ekor b. 8.431 kg	3.330.000	a. 96.243.378 ekor b. 28.741 kg c. 2 petujuk teknis	11,741,207	DKP	DIY



Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	L o k a s i		
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
								.738 Tawes : 1.223 .741 Udan galah : 9.075 .000 Band eng : 875.000 b.9.000 kg terdiri dari : Nilasa : 7.180 kg Mas najawa : 540 kg Gura mi :			00 tawes : 136.000 band eng : 136.000 udan galah : 1.409 .875 b.3.280 kg terdiri dari : Nilasa : 2.080 kg mas najawa : 50 kg lele : 990 kg										

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	20	
								250 kg Lele : 1.030 kg		gura mi : 160 kg c. 2 Pe tu nj uk Te kn is										
		Menjadi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	89.600		89.700		89.700		4.958.847	DKP	DIY
				Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88%	7.866.157	90%	4.958.847	90%	4.958.847	DKP	DIY	
		Menjadi	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terkelolanya kawasan perikanan budidaya serta terdistribusinya benih dan induk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 kab/kota	7.866.157	5 kab/kota	4.958.847	5 kab/kota	4.958.847	DKP	DIY	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	L o k a s i
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	20
		Menjadi	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DAK Fisik)	a. Rehabilitasi Bangunan Panti Benih / Bangsal / Hatchery UK BAL Sundak b. Rehabilitasi Hatchery Utara Karantina BAT Cangkringan c. Rehabilitasi kolam atau bak Pemijahan/induk/ calon induk/ pakan alami/tandon UK BAL Sundak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 1 Paket b. 1 Paket c. 1 Paket	560.000	N/A	N/A	a. 1 Paket b. 1 Paket c. 1 Paket	560.000	DKP	DIY
		Menjadi	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan	a. Benih Ikan dan Udang Bersertifikat Terdistribusi b. Calon Induk Ikan Bersertifikat Terdistribusi c. Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul d. Petunjuk Teknis e. Benih Ikan Bersertifikat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 29.30 Ekor b. 8030 Kg c. 3	3.518.640	a. N/A b. 6.491 Kg c. N/A d.	2.500.001	a. N/A b. 6.491 Kg c. N/A d.	2.500.001		

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
			Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terdistribusi f. Benih Udang Bersertifikat Terdistribusi g. Petunjuk teknis ujicoba budidaya ikan air tawar h. Petunjuk teknis ujicoba budidaya ikan air payau/ laut								Paket d. 2 Buah		N/A e. 18.28 1.883 ekor f. 3.105.800 Ekor g. 1 dokumen h. 1 dokumen		N/A e. 18.28 1.883 ekor f. 3.105.800 Ekor g. 1 dokumen h. 1 dokumen				
		Menjadi	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Hasil Uji Hama dan Penyakit Ikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	350 sampel	278.747	350 sampel	203.537	350 sampel	203.537		DKP	DIY
		Menjadi	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas	a. Jumlah sertifikat MPM CPIB b. Jumlah unit budidaya/kelompok yang direkomendasikan untuk sertifikasi CBIB c. Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPIB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 7 sertifikat b. 15 unit c. 2 UPR	566.465	a.N/A b. 10 unit c. 2 UPR d. 5 sertifi	162.800	a.N/A b. 10 unit c. 2 UPR d. 5 sertifi	162.800		DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
			Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	d. Jumlah sertifikat MPM																
		Menjadi	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	a. Jumlah perjanjian kerjasama pelaku usaha perikanan budidaya b. Pelatihan budidaya minapadi c. Pembentukan rintisan desa minawisata d. Produksi perikanan budidaya yang difasilitasi e. Studi desa wisata berbasis perikanan f. Produksi perikanan budidaya yang dibina (nila) g. Produksi perikanan budidaya yang dibina (gurami) h. Produksi perikanan budidaya yang dibina (lele) i. Produksi perikanan budidaya yang dibina (ikan hias)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 2 dokumen b. 2 lokasi c. 3 desa d. 100 ton e. 1 dokumen	2.942.305	a. 2 dokumen b. N/A c. N/A d. N/A e. N/A f. 12,86 ton g. 2,59 ton h. 23,51 ton i. 89,856 ekor	2.092.508	a. 2 dokumen b. N/A c. N/A d. N/A e. N/A f. 12,86 ton g. 2,59 ton h. 23,51 ton i. 89,856 ekor	2.092.508		DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Semula	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	5.001	5.817	1,089,647	6.199	1,735,327	6.481	407,147	6.863	2.524.588	7.063	2.640.000	7.063	7,307,062	DKP	DIY
		Semula	A. Pengembangan Perikanan Tangkap	a. Pelatihan dan fasilitasi alat tangkap	n/a	a. 12 kelompok	1,089,647	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	a. 12 kelompok	1,089,647	DKP	DIY
		Semula	B. Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap	a. Jumlah nelayan baru b. Jumlah nelayan memiliki sertifikat BST/ ketrampilan Simulasi Radar/ penggunaan alat penangkapan ikan ramah lingkungan/ perbaikan dan perawatan mesin/ laminasi PMT c. Produksi kelompok nelayan d. Jumlah calon nelayan baru e. Jumlah nelayan yang memiliki sertifikat pelatihan keterampilan kenelayanan f. Masterplan dan DED Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gesing g. Amdal Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gesing, Gunungkidul	N/A	N/A	N/A	a. 15 orang b. 30 orang c. 48 ton	1,123,087	a. 0 orang b. 27 orang c. 0 ton	314,790	a. N/A b. N/A c. 48 ton d. 10 orang e. 120 orang f. 1 paket	1.723.588	a. N/A b. N/A c. 48 ton d. 10 orang e. 120 orang f. N/A g. N/A	1.740.000	a. 15 orang b. 57 orang c. 144 ton d. 20 orang e. 240 orang f. 1 paket g. N/A	4,901,465	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Semula	C. Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap	a. Jumlah kelompok usaha bersama yang mengalami peningkatan pendapatan b. Jumlah dokumen kerjasama kemitraan perikanan tangkap c. Jumlah Kapal yang memiliki Buku Kapal perikanan d. Jumlah Kapal yang melengkapi perizinan secara OSS (Online Single Submission) e. Jumlah kapal perikanan yang dilengkapi dokumen perijinan	N/A	N/A	N/A	a. 4 kelompok b. 2 dokumen perijinan kerjasama c. 10 kapal d. 10 kapal	612,240	a. 0 kelompok b. 0 dokumen c. 1 kapal d. 1 kapal	92,357	a. 4 kelompok b. 2 dokumen c. 4 kapal d. N/A e. 8 kapal perikanan	801.000	a. 4 kelompok b. 3 dokumen c. 2 kapal d. N/A e. 8 kapal perikanan	900.000	a. 12 kelompok b. 7 dokumen c. 17 kapal d. 11 kapal e. 16 kapal perikanan	2,405,597	DKP	DIY
		Semula	Program Pengelolaan Pelabuhan	nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan (milyar)	N/A	32.84	169.646	33,31	178.000	34,78	91,118	35,25	195.225	36,73	286.000	36,73	919,989	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Semula	A. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	a. Magang Calon Operator Docking Kapal Perikanan b. Pembinaan Pelayanan Pelabuhan c. Jumlah nelayan yang beroperasi sesuai rekomendasi pada SOP perizinan dan keselamatan pelayaran PPP. d. Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP pengelolaan pelabuhan PPP. e. Kajian Penyusunan Koordinat Wilayah Kerja Daratan dan Wilayah Kerja Perairan PPP f. DED dan Amdal Sadeng	N/A	a. 2 orang b. 200 orang c. N/A d. N/A e. N/A	169.646	a. N/A b. N/A c. N/A d. 45 orang e. 55 orang	99.000	a. n/a b. n/a c. n/a d. 30 orang e. n/a	9,227	a. N/A b. N/A c. 50 orang d. 60 orang e. 1 dokumen f. N/A	138.600	a. N/A b. N/A c. 60 orang d. 70 orang e. N/A f. 1 paket	143.000	a. 2 orang b. 200 orang c. 155 orang d. 215 orang e. 1 dokumen f. 1 paket	559,473	DKP	DIY
		Semula	B. Pelayanan Pelabuhan Perikanan	a. Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhan (PPP) b. Review Masterplan PPP Sadeng	n/a	n/a	n/a	a. 50 orang	79.000	a. 30 orang b. 1 dokumen	81,891	a. 70 orang	56.625	a. 80 orang	143.000	a. 230 orang b. 1 dokumen	360,516	DKP	DIY
		Menjadi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.863	1.616.499	7.063	54.208.000	7.063	54.208.000	DKP	DIY
		Menjadi	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai	Terfasilitasinya pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 kabu paten	419.496	N/A	N/A	3 kabu paten	419.496	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			Dengan 12 Mil																
		Menjadi	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	data produksi perikanan dan kelautan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	114.609	N/A	N/A	1 tahun	114.609	DKP	DIY
		Menjadi	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah KUB yang mengalami peningkatan pendapatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 kelompok	304.887	Pindah ke DAIS Kebudayaan	N/A	4 kelompok	304.887	DKP	DIY
		Menjadi	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1	Terkelolanya Penangkapan Ikan di wilayah Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 kabupaten	1.073.193	N/A	N/A	3 kabupaten	1.073.193	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			(satu) Daerah Provinsi																
		Menjadi	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	a. Jumlah calon nelayan baru b. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan kenelayanan c. Produksi kelompok nelayan yang difasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 10 orang b. 90 orang c. 48 ton	1.073.193	Pindah ke DAIS Kebudayaan	N/A	a. 10 orang b. 90 orang c. 48 ton	1.073.193	DKP	DIY
		Menjadi	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terfasilitasinya rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8 rekomendasi	59.465	8 rekomendasi	25.616	8 rekomendasi	25.616	DKP	DIY
		Menjadi	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai	a. Jumlah dokumen kerja sama kemitraan perikanan tangkap b. Jumlah kapal perikanan yang dilengkapi dengan dokumen perizinan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 2 dokumen b. 8 kapal	59.465	a.1 dokumen b. 8 kapal	25.616	a.1 dokumen b. 8 kapal	25.616	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
			dengan 30 GT																	
		Menjadi	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terfasilitasinya kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 kapal	64.345	1 kapal	28.592	1 kapal	28.592	DKP	DIY	
		Menjadi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah kapal yang memiliki Buku Kapal Perikanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 kapal	64.345	1 kapal	28.592	1 kapal	28.592	DKP	DIY	
		Menjadi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan (milyar)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35,25	1.932.871	36,73	113.720	36,73	113.720	DKP	DIY	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Menjadi	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah dokumen kapal yang diterbitkan (STBLKK, SPB, Rekomendasi BBM Bersubsidi, Tambat Labuh, dan SKA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2000 dokumen	1.932.871	1000 dokumen	113.720	1000 dokumen	113.720	DKP	DIY
		Menjadi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (DAK Fisik)	a. Pembangunan reservoir air tawar b. Perbaikan dermaga PPP Sadeng	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 1 paket b. 1.100 m2	1.762.332	N/A	N/A	a. 1 paket b. 1.100 m2	1.762.332	DKP	DIY
		Menjadi	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	a. Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan yang beroperasi sesuai SOP pengelolaan pelabuhan b. Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhan c. Jumlah nelayan yang beroperasi sesuai rekomendasi pada SOP perizinan dan keselamatan pelayaran d. Penyusunan koordinat wilayah kerja perairan dan daratan e. Jumlah nelayan yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhan f. Jumlah pelaku usaha perikanan yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhan g. Sosialisasi WKOPP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 60 orang b. 70 orang c. 50 orang d. 1 dokumen	170.539	a. N/A b. N/A c. 60 orang d. N/A e. 60 orang f. 60 orang g. 75 orang	113.720	a. N/A b. N/A c. 60 orang d. N/A e. 60 orang f. 60 orang g. 75 orang	113.720	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Semula	Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Produksi produk perikanan olahan (ton)	7,81	8.201	1,944.421	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8.201	1,944.421	DKP	DIY
				Tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	n/a	n/a	n/a	24,55	3,654,018	22,50	1,172,051	25,48	2.192.933	26,05	1.974.000	26,05	8,993,002	DKP	DIY
		Semula	A. Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan b. Kampanye Alih Teknologi Ikan (ATI)	a. Pelatihan dan fasilitasi olahan ikan b. Kampanye Alih Teknologi Ikan (ATI)	n/a	a. 29 kelo mpok b. 49 kelo mpok	1,944,421	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	a. 29 kelo mpok b. 49 kelo mpok	1,944,421	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Semula	B. Pengolahan hasil Perikanan	a. produksi perikanan olahan dari kelompok pemula b. jumlah orang yang memiliki kemampuan mengolah ikan yang berkualitas c. produksi perikanan olahan dari kelompok madya d. Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diberikan pada Unit Pengolah Ikan e. Jumlah produk olahan hasil perikanan yang direkomendasikan layak untuk mendaftar SPPT SNI f. Jumlah rekomendasi perijinan usaha g. persentase hasil perikanan yang memenuhi standar mutu h. Jumlah rekomendasi Unit Pengolah Ikan yang akan diajukan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) i. persentase hasil uji laboratory m produk perikanan j. produksi perikanan olahan dari kelompok pengolah	N/A	N/A	N/A	a. 0,5 ton b. 3000 orang c. 4,32 ton d. 10 sertifikat e. 2 produk f. 3 rekomendasi g. 75% h. 5 rekomendasi i. 78% j. 70%	2,257,915	a. 0 ton b. 450 orang c. 0 ton d. N/A e. N/A f. N/A g. N/A h. 5 rekomendasi i. 78% j. 7.2 ton	464,860	a. N/A b. 1050 orang c. N/A d. N/A e. N/A f. N/A g. N/A h. N/A i. 78% j. 7.2 ton	1.084.237	a. N/A b. 1050 orang c. N/A d. N/A e. N/A f. N/A g. N/A h. N/A i. 78% j. 7.2 ton	1.100.000	a. N/A b. 5550 orang c. N/A d. N/A e. N/A f. N/A g. N/A h. N/A i. 78% j. 21,6 ton	4,907,012	DKP	DIY
		Semula	C. Pemasaran hasil Perikanan	a. jumlah masyarakat yang memahami manfaat makan ikan b. persentase penjualan produk olahan c. jumlah pelaku usaha yang meningkat omzetnya d. jumlah dokumen perjanjian kerjasama	N/A	N/A	N/A	a. 6500 orang b. 90% c. 30 orang/kelompok	1,396,103	a. 740 orang b. 0% c. 0 orang atau kelompok	707,191	a. 3.760 orang b. 90% c. N/A d.	1.108.696	a. 3.450 orang b. 90% c. N/A d.	874,000	a. 14.450 orang b. 90% c. N/A	4,085,990	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	L o k a s i
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
				e. jumlah dokumen sistem logistik ikan daerah f. jumlah dokumen perjanjian kerjasama yg terealisasi g. Pasar mina			mpok			d. n/a e. n/a		N/A e. N/A f. 4 dokumen g. 4 kali		N/A e. N/A f. 4 dokumen g. 4 kali		d. N/A e. N/A f. 8 dokumen g. 8 kali			
		Menjadi	Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25,48	2.292.794	26,05	1.380.226	26,05	1.380.226	DKP	DIY
			Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20 rekomendasi	726.670	15 rekomendasi	474.240	15 rekomendasi	474.240	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	L o k a s i
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah orang yang memiliki kemampuan mengolah ikan yang berkualitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1675 orang	726.670	1250 orang	474.240	1250 orang	474.240	DKP	DIY
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya pengawasan kualitas produk olahan dan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	1.257.554	1 tahun	894.526	1 tahun	894.526	DKP	DIY
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan	a. Produksi perikanan olahan dari kelompok pengolah b. Prosentase hasil uji laboratorium produk perikanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 7,2 ton b. 78%	515.099	a. 7,2 ton b. 78%	225.620	a. 7,2 ton b. 78%	225.620	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
			atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar																	
			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	jumlah masyarakat yang memahami manfaat makan ikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3390 orang	742.455	2580 orang	668.906	2580 orang	668.906		DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya pelaku usaha kelautan dan perikanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 kelompok	308.570	10 kelompok	11.460	10 kelompok	11.460	DKP	DIY
			Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	a. Jumlah dokumen perjanjian kerjasama b. Pasar mina c. Prosentase penjualan produk olahan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 4 dokumen b. 4 kali c. 90%	308.570	a. 2 dokumen	11.460	a. 2 dokumen	11.460	DKP	DIY
		Semula	Program Konservasi Ekosistem dan Pengawasan	Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	n/a	14 %	860,517	14 %	800,000	14 %	421,939	14 %	1.149.933	14 %	1.180.000	70	4,412,391	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
			sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	n/a	10%		10%		10%		10%		10%		10%				
		Semula	A. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	a. Pendampingan konservasi ekosistem sumberdaya kelautan dan perikanan b. Penebaran Benih Ikan (kepiting, bandeng, nila, dan tawar)	n/a	a. 440 orang b. 2.912.000 ekor	710.517	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	a. 440 orang b. 2.912.000 ekor	710.517	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
		Semula	B. Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan dan Laut	a. Perairan darat dan laut aman	n/a	a. 1 tahun	150.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	a. 1 tahun	150.000	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Semula	C. Gerakan Konservasi ekosistem kelautan dan perikanan	a. jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	n/a	n/a	n/a	a. 100 orang	109,564	a. 0 orang	3,084	a. N/A	N/A	a. 100 orang	475,000	a. 200 orang	587,648	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Semula	D. Restocking Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	a. Populasi Sumberdaya kelautan dan perikanan bertambah	n/a	n/a	n/a	a. 940.000 ekor	214,329	a. 990.000 ekor	317,790	a. 867.000 ekor	406.917	a. 570.000 ekor	400.000	a. 3.367.000 ekor	1,339,036	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Semula	E. Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi	a. jumlah dokumen perencanaan kawasan konservasi	n/a	n/a	n/a	a. 1 Dokumen Rekomendasi Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DIY	191,107	a. 1 dokumen KAK	1,200	a. 1 dokumen Jumlah dokumen perencanaan pengelolaa n dan zonasi kawasan konservasi (1 kab)	267.220	a.1 Dokumen pengajuan penetapan Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DIY ke KKP	300.000	a.1 Dokumen pengajuan penetapan Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DIY ke KKP	759,227	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Semula	F. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	a. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Mutu Produk Perikanan b. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan terpadu di Perairan Umum Daratan c. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan terpadu dilaut d. Jumlah Pengawasan Mutu Produk Perikanan e. Jumlah Pengawasan terpadu di Perairan Umum Daratan f. Jumlah Pengawasan terpadu dilaut g. Jumlah produk perikanan yg sesuai standar mutu	N/A	N/A	N/A	a. 20 dokumen b. 20 dokumen c. 2 dokumen	285,000	a. N/A b. N/A c. N/A d. 17 kali e. 17 hari f. 12 hari g. 78 %	99,865	a. N/A b. N/A c. N/A d. 17 kali e. 17 kali f. 3 kali	475.796	a. N/A b. N/A c. N/A d. 17 kali e. 17 hari f. 12 hari g. 78 %	480.000	a. 20 dokumen b. 20 dokumen c. 2 dokumen d. 34 kali e. 34 hari f. 24 hari g. 78 %	1,340,661	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
												h produk yg diawasi kali 100%)		h produk yg diawasi kali 100%)		i di bagi jumlah produk yg diawasi kali 100%)			
		Menjadi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14%	1.027.353	14%	212.629				

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Menjadi	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kawasan	1.027.353	1 kawasan	212.629	1 kawasan	212.629	DKP	DIY
		Menjadi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	a. Jumlah dokumen rencana pengelolaan kawasan dan zonasi kawasan konservasi (1 kab) b. Tugu batas kawasan konservasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 1 dokumen	243.907	a. N/A b. Pindah ke DAIS Tata Ruang	N/A	a. 1 dokumen	243.907	DKP	DIY
		Menjadi	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Populasi sumberdaya kelautan dan perikanan bertambah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	867.000 ekor	661.585	366.674 ekor	212.629	366.674 ekor	212.629	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Menjadi	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	a. Peningkatan pemahaman masyarakat pesisir terhadap konservasi mangrove b. Peningkatan pemahaman masyarakat pesisir terhadap konservasi penyu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a.50 orang b. 175 orang	121.861	N/A	N/A	a.50 orang b. 175 orang	121.861	DKP	DIY
		Menjadi	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Sosialisasi mitigasi bencana alam laut	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Pindah ke DAIS Kebudayaan	N/A	N/A	N/A	DKP	DIY
		Menjadi	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bimtek produksi usaha garam rakyat sistem tunnel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Pindah ke DAIS Kebudayaan	N/A	N/A	N/A	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Menjadi	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10%	357.635	10%	170.034	10%	170.034	DKP	DIY
		Menjadi	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terawasinya sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	117.469	1 tahun	127.465	1 tahun	127.465	DKP	DIY
		Menjadi	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah pengawasan terpadu di laut	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 hari	117.469	2 kali	66.099	2 kali	66.099	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Menjadi	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Pokmaswas aktif di DIY	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50 kelompok	61.366	50 kelompok	61.366	DKP	DIY
		Menjadi	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terawasinya sumberdaya perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	240.165	1 tahun	42.569	1 tahun	42.569	DKP	DIY

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Menjadi	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah pengawasan terpadu di Perairan Umum Daratan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17 hari	216.214	10 kali	17.569	10 kali	17.569	DKP	DIY
		Menjadi	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk perikanan yang sesuai standar mutu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	78%	23.951	20 kali	25.000	20 kali	25.000	DKP	DIY



Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																

Tabel 12. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Dana Keistimewaan

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Semula	Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	a. Tersusunnya dokumen KLHS Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil b. Pendampingan penetapan Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil c. Penyusunan dokumen acuan Perijinan Pemanfaatan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil di DIY d. Penyusunan bahan untuk penetapan Rapergub DIY tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RPWP3K) e. Penyusunan dokumen	n/a	a. 1 dokumen b. 1 paket c. n/a d. n/a e. n/a f. n/a g. n/a h. n/a i. n/a	500,000	a. n/a b. n/a c. 1 dokumen d. 1 dokumen e. 1 dokumen f. 6 paket g. 1 dokumen h. n/a i. n/a	499,689	a. n/a b. n/a c. n/a d. n/a e. n/a f. n/a g. n/a h. 1 dokumen i. 180 orang	0	a. 1 dokumen b. 1 paket c. n/a d. n/a e. n/a f. n/a g. n/a h. n/a i. n/a	650,000	a. 1 dokumen b. 1 paket c. n/a d. n/a e. n/a f. n/a g. n/a h. n/a i. n/a	650,000	a. 1 dokumen b. 1 paket c. n/a d. n/a e. n/a f. n/a g. n/a h. n/a i. n/a	650,000	DKP	DIY



Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
				kebijakan satu peta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil f. sosialisasi Perda no 9 tahun 2018 tentang RZWP3K g. Studi Orientasi pelaksanaan pelaksanaan Pergub Perijinan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Di Provinsi Jatim h. Tersedianya bahan untuk penetapan Rapergub DIY tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K) i. Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di DIY															



Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		Menjadi	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40%	210.000	40%	N/A	40%	N/A	DKP	DIY
		Menjadi	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		210.000	N/A	N/A	N/A	N/A	DKP	DIY
		Menjadi	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	a. Materi teknis integrasi wilayah perairan laut dan pesisir pada Rencana Tata Ruang Wilayah b. Tugu Batas Kawasan Konservasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 1 dokumen	210.000	a. N/A b. 1 kawasan	N/A	a. N/A b. 1 kawasan	N/A	DKP	DIY
		Semula	Program Pengembangan Kearifan Lokal Dan Potensi Budaya Kegiatan Pengembangan Budaya Bahari	a. Lomba perahu nelayan b. Pameran produk kelautan dan perikanan c. Gerakan cinta laut (gita laut) d. Seminar pertumbuhan jiwa bahari e. Saresehan	n/a	n/a	n/a	a. 1 paket (50 PMT) b. 1 paket c. 1 paket d. 1 Angkt (50 org) e. 1 angkt (100 org) f. 1 angkt (50 org) g. n/a	635,000,000	a. 1 paket (50 PMT) b. 1 paket c. 1 paket d. 3 Angkt (50 org) e. 3 angkt (100 org) f. n/a g. 300 orang	0	a. 1 paket (50 PMT) b. 1 paket c. 1 paket d. 3 Angkt (50 org) e. 3 angkt (100 org) f. n/a g. 300 orang	1,350,000,000	a. 1 paket (50 PMT) b. 1 paket c. 1 paket d. 3 Angkt (50 org) e. 3 angkt (100 org) f. n/a g. 300 orang	1,350.000,000	a. 4 paket (50 PMT) b. 4 paket c. 4 paket d. 10 Angkt (50 org) e. 10 angkt (100 org) f. 1 angkt g. 900 orang	1,350,000	DKP	DIY



Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
				kemaritiman bagi pemangku kepentingan f. Sosialisasi budaya kebaharian g. Pemahaman budaya bahari															
		Menjadi	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan Budaya tak benda yang dilestarikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16,82%	50.666.755	16,82%	122.878.684	16,82%	122.878.684	DKP DIY	DIY
		Menjadi	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	50.666.755	1 tahun	122.878.684	1 tahun	122.878.684	DKP DIY	DIY
		Menjadi	Pengembangan Budaya Bahari	a. Appraisal pengadaan tanah Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gesing b. Desa Maritim c. Gita Laut (Gerakan Cinta Laut) d. Kajian Rintisan Desa Maritim	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 1 dokumen b. 6 desa c. 1500 orang d. 1 dokumen e. 1 dokumen f. 1 kegiatan g. 1 kegiatan h. 1 kegiatan i. 1 kegiatan j. 1 kegiatan	50.666.755	a. N/A b. N/A c. N/A d. N/A e. N/A f. N/A g. N/A h. N/A i. N/A j. N/A k. N/A l. N/A	122.878.684	a. N/A b. N/A c. N/A d. N/A e. N/A f. N/A g. N/A h. N/A i. N/A j. N/A k. N/A l. N/A	122.878.684	DKP DIY	DIY



Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
				e. Kajian Rintisan Kampung Mina Mataraman f. Kemah Bahari g. Lomba Mancing h. Lomba masak ikan tingkat provinsi i. Lomba mewarnai dan menggambar tingkat SD j. Lomba Pokdakan ber-CBIB dan Pra CBIB k. Lomba Pokmaswas (Kelompok pengawas) l. Lomba Produktivitas Nelayan m. Lomba UPI (Unit Pengolahan Ikan) n. Monev Desa Maritim o. Pameran produk kelautan dan perikanan p. Pelatihan Budidaya Ikan Lele dalam									k. 1 kegiatan l. 1 kegiatan m. 1 kegiatan n. 1 dokumen o. 1 kegiatan p. 59 angkatan q. 2 angkatan r. 41 angkatan s. 4 angkatan t. 1 kegiatan u. 1 dokumen v. 1 dokumen w. 1 dokumen x. 2 dokumen y. 2 angkatan z. 1 kegiatan aa. 2 angkatan ab. 4 angkatan ac. 60 angkatan ad. 4 jenis ae. 60 angkatan af. 6 desa ag. 1500 orang		m. N/A n. N/A o. N/A p. N/A q. N/A r. N/A s. N/A t. N/A u. N/A en v. N/A w. N/A x. N/A y. N/A z. N/A aa. N/A ab. 4 N/A ac. N/A ad. 4 jenis ae. 60 angkatan af. 6 desa ag. 1500 orang ah. 1 krgiatan ai. 1 kegiatan aj. 1 aktivitas ak. 1 kegiatan al. 60 angkatan		m. N/A n. N/A o. N/A p. N/A q. N/A r. N/A s. N/A t. N/A u. N/A en v. N/A w. N/A x. N/A y. N/A z. N/A aa. N/A ab. 4 N/A ac. N/A ad. 4 jenis ae. 60 angkatan af. 6 desa ag. 1500 orang ah. 1 kegiatan ai. 1 kegiatan aj. 1 aktivitas ak. 1 kegiatan al. 60 angkatan			



Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
				Ember (Budidamber) q. Pelatihan Diversifikasi Olahan Produk Perikanan r. Pelatihan Ikan Hias (Aquascape) s. Pelatihan Perikanan Tangkap t. Pengadaan tanah dan sertifikasi Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gesing u. Penyusunan Amdal Lain Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gesing v. Penyusunan Amdal Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gesing w. Penyusunan DED Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan								ah. 1 kegiatan ai. 1 kegiatan aj. 1 aktivitas ak. 1 kegiatan al. 60 angkatan am. 2 angkatan an. 1 kawasan ap. 60 angkatan		am. 2 angkatan an. 1 kawasan ao. 60 angkatan ap. 30 orang aq. 30 orang ar. 5 org as. 30 org at. 24 ton au. 2 kelompok		am. 2 angkatan an. 1 kawasan ao. 60 angkatan ap. 30 orang aq. 30 orang ar. 5 org as. 30 org at. 24 ton au. 2 kelompok			



Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
				(PPI) Gesing x. Review Masterplan Pengembangan UPTD BPTPB Cangkringan dan Penyusunan DED Pembangunan Pasar Tradisional Perikanan Cangkringan Sleman DIY y. Sarasehan kemaritiman z. Sepeda Bahari aa. Sosialisasi Budaya Bahari ab. Sosialisasi Desa Maritim ac. Sosialisasi Pengkayaan Sumberdaya Ikan Lokal ad. Broodstock Pengkayaan Varietas Ikan Lokal ae. Budidaya ikan hias (aquascape) af. Desa Maritim (BKK) ag. Gita Laut (Gerakan Cinta															



Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
				Laut) ah. Kontes Ikan Hias Piala Gubernur ai. Lomba Perahu Nelayan aj. Mangayubagya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur ak. Pameran produk kelautan dan perikanan al. Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember (Budidamber) am. Pelatihan Diversifikasi Olahan Produk Perikanan an. Pembangunan PPI Gesing ao. Sosialisasi Pengkayaan Sumberdaya Ikan Lokal ap. Sosialisasi mitigasi bencana alam laut aq. Bimtek produksi usaha															



Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
				garam rakyat sistem tunnel ar. Jumlah calon nelayan baru as. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan kenelayanan at. Produksi kelompok nelayan yang dibangun. Jumlah KUB yang mengalami peningkatan pendapatan"															

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (juta rupiah)	312.662	318.947	322.136	325.357	328.611	331.897	331.897
2	Peningkatan status kawasan konservasi (%)	N/A	20	30	60	80	100	100

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa indikator yang mengacu pada sasaran RPJMD ada 2 yaitu PDRB sektor Kelautan dan Perikanan serta Luas kawasan yang direhabilitasi atau konservasi. Kedua indikator tersebut menjadi tolok ukur dari pembangunan di sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Selain adanya peningkatan pendapatan PDRB sektor kelautan dan perikanan yang akan berdampak pada PDRB per kapita masyarakat nelayan dan budidaya, luas kawasan yang direhabilitasi atau dikonservasi juga meningkat.



Bab VIII Penutup

2.1. Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Perubahan Renstra Perangkat daerah setelah dicermati dan dibahas bersama Tim Renstra.
- 2) Perumusan Perubahan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil pencermatan dan pembahasan bersama Tim Renstra.
- 3) Sistematika Perubahan Renstra Perangkat Daerah sama dengan sistematika rancangan Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

- 1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- 2) Verifikasi Perubahan Renstra Perangkat daerah harus dapat menjamin kesesuaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Perda tentang RPJMD dan hasil pembahasan Musrenbang Penyusunan RKPD.
- 3) BAPPEDA menyampaikan Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- 4) Perkada Perubahan Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦧꦩꦥꦺꦢꦤ꧀ꦥꦼꦫꦺꦤꦠꦤ꧀ꦥꦼꦧꦁꦸꦤꦤ꧀ꦢꦤꦺꦴꦫꦁ

Alamat : Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 589583 (Fax (0274) 586712
Website : www.bappeda.jogjaprov.go.id Email : bappeda@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

Yogyakarta, 02 Agustus 2022

Nomor : 050/06155
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Reviu Rancangan
Akhir Perubahan RKPD DIY Tahun
2022

Kepada

Yth. Paniradya Pati/ Inspektur/
Sekretaris DPRD/ Kepala Dinas
Daerah/ Kepala Badan Daerah/
Kepala Satpol PP/ Kepala Biro/
Kepala Badan Penghubung di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta

di-

Yogyakarta

Berdasarkan surat dari Inspektur DIY Nomor X.700/62/SP/2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir RKPD-P DIY Tahun 2022, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD) agar memastikan catatan hasil reviu sebagaimana terlampir telah ditindaklanjuti dalam perubahan RKPD DIY Tahun 2022 dan perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2022.
2. Bagi Perangkat Daerah (PD) yang terdapat penambahan program/kegiatan/subkegiatan baru dalam Perubahan RKPD DIY Tahun 2022, diwajibkan menyusun Perubahan Renstra PD. Perubahan Renstra PD Tahun 2017-2022 mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Rancangan Perubahan Renstra PD Tahun 2017-2022 sebagaimana poin 2, disampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda paling lambat pada tanggal 4 Agustus 2022 untuk diverifikasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA,
Drs. BENY SUHARSONO, M.Si
NIP. 19650512 198602 1 002

- tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rancangan Akhir RKPD-P DIY Tahun 2022 yang disusun secara umum telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 3. Hasil pengujian atas rumusan Rancangan Akhir RKPD-P DIY Tahun 2022 kaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain RPJPD DIY Tahun 2005-2025, RPJMD DIY Tahun 2017-2022, RPJMN Tahun 2020-2024, RKP 2022, serta substansi isi dari Rancangan Akhir RKPD-P DIY Tahun 2022, masih ditemukan kelemahan sebagaimana terlampir dalam Catatan Hasil Reviu (CHR).

Berdasarkan hasil reviu tersebut di atas disarankan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY agar melakukan perbaikan atas Rancangan Akhir RKPD-P DIY Tahun 2022 secara paralel dengan proses penyusunan Rancangan Akhir RKPD-P DIY Tahun 2022 berdasarkan Catatan Hasil Reviu (CHR) sebagaimana terlampir.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Permerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
4. Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor SP/72/K/INSP/2022 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Dalam Rangka Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Pemerintah Daerah DIY Tahun 2022.

III. TUJUAN REVIU

Memberikan keyakinan terbatas bahwa Rancangan Akhir RKPD-P DIY Tahun 2022 telah didukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2022;
- c. RPJPD DIY 2005-2025;
- d. RPJMD DIY 2017-2022;
- e. Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY.

IV. RUANG LINGKUP DAN WAKTU REVIU

- a. Pengujian terbatas terhadap Rancangan Akhir RKPD-P DIY Tahun 2022 mulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan Rancangan Akhir RKPD-P.
- b. Reviu Rancangan Akhir RKPD-P DIY Tahun 2022 dilaksanakan mulai tanggal 21 Juli s.d. 29 Juli 2022 (7 hari kerja).

V. METODOLOGI REVIU

1. Reviu RKPD-P DIY Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. Reviu RKPD-P DIY Tahun 2022 dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan RKPD-P DIY Tahun 2022 sebagai bahan penetapan Peraturan Gubernur DIY tentang RKPD-P DIY Tahun 2022.
2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi:
 - a. Mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2022 beserta dokumen pendukungnya;
 - b. Wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKPD-P DIY Tahun 2022;
 - c. Klarifikasi, konfirmasi, dan koordinasi dengan pihak terkait.

VI. GAMBARAN UMUM

1. Proses Penyusunan RKPD-P DIY Tahun 2022 dilakukan dengan tahapan:

a. Penyusunan ...//

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
 - b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
 - c. Penetapan.
2. Sistematika RKPD-P DIY Tahun 2022
- RKPD-P DIY Tahun 2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB 1 Pendahuluan
Bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, dasar pertimbangan perubahan APBD Tahun 2022, dasar hukum, dan sistematika penyusunan dokumen perubahan RKPD.
 - b. BAB 2 Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan
Bab ini menyampaikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2021 serta Tahun 2022 sampai dengan triwulan II.
 - c. BAB 3 Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
Bab ini berisi tentang perubahan asumsi makro ekonomi, arah kebijakan nasional, dan proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah Tahun 2022.
 - d. BAB 4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab ini berisi mengenai penyesuaian sasaran, tema dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan prioritas daerah dalam RKPD-P Tahun 2022.
 - e. BAB 5 Rencana Kerja dan Pendanaan
Bab ini berisi mengenai rincian program, kegiatan, sub kegiatan, dan tolak ukur kinerja serta pagu anggaran perubahan Tahun 2022
 - f. BAB 6 Penutup
Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penyusunan dokumen perubahan RKPD-P Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta.

VII. URAIAN HASIL REVIU

Berdasarkan hasil Reviu Rancangan Akhir RKPD-P DIY Tahun 2022, kami sampaikan hasil sebagai berikut :

1. Rumusan rancangan akhir RKPD-P telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen RKPD-P sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rancangan Akhir RKPD-P yang disusun secara umum telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai yaitu:
 - a. RPJPD ... //

- a. RPJPD DIY 2005 - 2025;
 - b. RPJMD DIY 2017 - 2022;
 - c. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.
3. Hasil pengujian rumusan Rancangan Akhir RKPD-P DIY Tahun 2022 kaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya antara lain RPJPD DIY Tahun 2005-2025, RPJMD DIY Tahun 2017-2022, RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2022 serta substansi isi dari Rancangan Akhir RKPD-P DIY Tahun 2022, kami sampaikan Catatan Hasil Reviu (CHR) sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil reviu atas RKPD-P DIY Tahun 2022 tersebut, disarankan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY agar melakukan perbaikan atas Rancangan Akhir RKPD-P DIY Tahun 2022 secara paralel dengan proses penyusunan Rancangan Akhir RKPD-P DIY Tahun 2022 berdasarkan Catatan Hasil Reviu (CHR) sebagaimana terlampir.


VIII. APRESIASI

Kami mengapresiasi dan menghargai usaha Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun RKPD-P DIY Tahun 2022, sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

IX. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) DIY Tahun 2022, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pit. INSPEKTUR
DAERAH Istimewa YOGYAKARTA



AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.,
NIP. 19680713 199803 2 003

Tembusan:
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

Lampiran Surat

Perihal Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir RKPD-P DIY Tahun 2022

**CATATAN HASIL REVIU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN (RKPD-P)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022**

1. Terdapat kesalahan penulisan pada:
 - a. Halaman 29, pada alinea 4 baris terakhir terdapat kalimat yang penggunaan tanda bacanya tidak tepat.
 - b. Halaman 41, pada Indeks grafik tertulis Nas. Kalimat belum lengkap.
 - c. Halaman 96, pada point 1 pada rekomendasi Menteri Koperasi tertulis "e calalog".
 - d. Halaman 103, pada Huruf d point 1 terdapat duplikasi kata "terhadap".
 - e. Halaman 104, pada Nomor 9 point b. Kata pada awal kalimat agar diperbaiki.
 - f. Halaman 105, pada point c. Kalimat tidak menggunakan ejaan baku.
 - g. Halaman 197, pada baris 3 kesalahan penulisan "i -2,69%".
 - h. Halaman 197, pada Paragraf 1 Baris 8. Tertulis "Perbahan RKPD".
 - i. Halaman 197, pada Paragraf 3 baris terakhir. Tertulis "meningkatnya".
 - j. Halaman 198, pada Paragraf 1 baris 1. Tertulis "pererkonomian DIY".
 - k. Halaman 199, pada Paragraf 1 baris 3. Tertulis "mnekan".
 - l. Halaman 199, pada Paragraf 1 baris 4. Tertulis "alkan".
 - m. Halaman 199, pada Paragraf 1 baris 5. Tertulis "penimngkatan".
 - n. Halaman 200, pada Paragraf 1 baris 8. Tertulis "di tahun 2021". Seharusnya "di tahun 2022."
 - o. Halaman 215, pada 3.2.2.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah. Tertulis "781 Juta". Seharusnya "871 Juta".
 - p. Halaman 224, pada Baris 14. Tertulis "pengeluaran".
2. Halaman 31, pada Tabel 2-5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016-2020 (dalam %). Belum menampilkan data terkini.
3. Halaman 38, pada Penjelasan Tabel 2-10 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2017-2021 terdapat kesalahan penulisan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo tahun 2018. Tertulis Kabupaten Kulon Progo mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu masing-masing 5,97%, 10,62% dan 13,49%. Seharusnya Kabupaten Kulon Progo mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu masing-masing 5,97%, 10,84% dan 13,49%.
4. Halaman 40, terdapat kesalahan perhitungan Rumus $IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$. Hasil Perhitungan nilai IKLH di DIY berada pada angka 66,15. Seharusnya sebesar 60,53.
5. Halaman 44, pada paragraf 1. Tertulis tahun 2022 akan ada peningkatan sebesar 6,39% sehingga proyeksi realisasi menjadi 57,92%. Seharusnya jika data tahun 2021 sebesar 51,81%, jika terdapat peningkatan sebesar 6,39% maka proyeksi realisasi menjadi 58,2%
6. Halaman 59, tertulis Capaian realisasi fisik pada bulan Mei 2022 sebesar 45,42% dengan capaian sebesar 44,15% (deviasi 1,27 %). Kalimat agar diperjelas yang dimaksud.

7. Halaman ...

7. Halaman 91, pada Tabel 2-17 Kinerja Kapasitas Organisasi Triwulan I Tahun 2022. Hasil penjumlahan persentase sangat baik – kurang tidak sama dengan 100%.
8. Halaman 198, pada Tabel 3-1 Perbandingan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dalam RKPD 2022 dan Perubahan RKPD 2022. Pada Kolom RKPD 2022 tertulis Indeks Williamson. Pesimis : 0,4569. Optimis: 0,4575. Nilai Optimis pada indeks Williamson seharusnya lebih kecil angkanya. Sebagaimana pada kolom di RKPDP 2022.
9. Halaman 209, judul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK. 07/2020 tertulis tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seharusnya tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Halaman 216, judul Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tertulis tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Seharusnya tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
11. Halaman 216, judul Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tertulis tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Seharusnya tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil.
12. Tabel Rencana Program dan Kegiatan dalam RKPD-P DIY 2022 belum sepenuhnya sesuai, terinci sebagai berikut:

Unit Kerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Catatan
Badan Penanggungjawab Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Anggaran mengalami kenaikan. TUK belum disesuaikan.
Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provins	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Anggaran mengalami kenaikan. TUK belum disesuaikan
Biro Tata Pemerintahan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Merupakan Sub Kegiatan baru. Belum tercantum dalam Rencana Strategis OPD.
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Merupakan Sub Kegiatan baru. Belum tercantum dalam Rencana Strategis OPD.

Unit Kerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Catatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Merupakan Sub Kegiatan baru. Belum tercantum dalam Rencana Strategis OPD.
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Merupakan Sub Kegiatan baru. Belum tercantum dalam Rencana Strategis OPD.
Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Merupakan Sub Kegiatan baru. Belum tercantum dalam Rencana Strategis OPD.
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Merupakan Sub Kegiatan baru. Belum tercantum dalam Rencana Strategis OPD.
Dinas Koperasi dan UKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel	Merupakan Sub Kegiatan baru. Belum tercantum dalam Rencana Strategis OPD.
Badan Kepegawaian Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Anggaran mengalami kenaikan. TUK belum disesuaikan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Anggaran mengalami kenaikan. TUK belum disesuaikan
Badan Kesbangpol	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ada penambahan sub kegiatan dan TUK baru
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Anggaran mengalami kenaikan. TUK belum disesuaikan

Unit ...

Unit Kerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Catatan
Badan Pendidikan dan Pelatihan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Anggaran mengalami kenaikan. TUK belum disesuaikan
Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Merupakan Sub Kegiatan baru. Belum tercantum dalam Rencana Strategis OPD.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Merupakan Sub Kegiatan baru. Belum tercantum dalam Rencana Strategis OPD.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Merupakan Sub Kegiatan baru. Belum tercantum dalam Rencana Strategis OPD.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Merupakan Sub Kegiatan baru. Belum tercantum dalam Rencana Strategis OPD.
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kesalahan dalam penulisan TUK



Pt. INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP 19680713 199803 2 003